

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) GUWOSARI SARI MAJU SEJAHTERA
(Studi Kasus Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



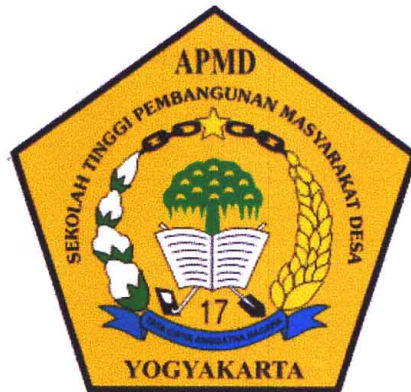
Disusun Oleh:

**OKTAVIANUS BALI
NIM 19510025**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2023**

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) GUWOSARI SARI MAJU SEJAHTERA (Studi Kasus Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)



Disusun Oleh:

OKTAVIANUS BALI
NIM 19510025

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023

Jam : 10:00 Wib

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

Dra. Widati, Lic, rer, reg.

Ketua Penguji/Pembimbing

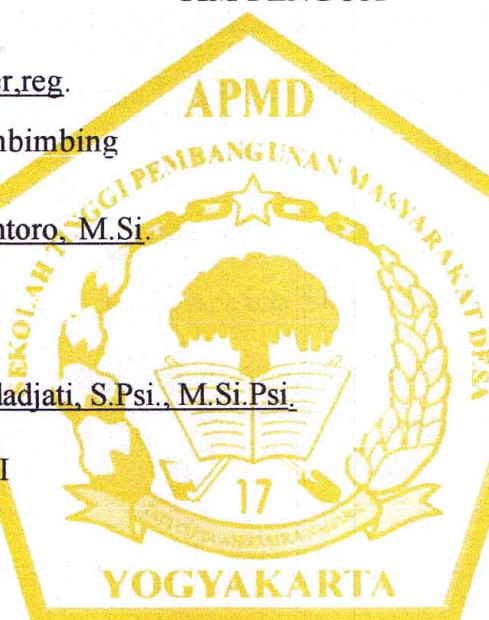
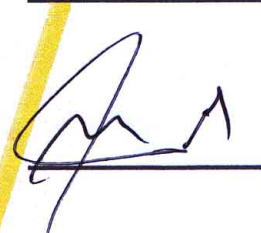
Drs. Oelin Maliyantoro, M.Si.

Penguji Samping I

Ratna Sesotya Wedadjati, S.Psi., M.Si.Psi.

Penguji Samping II

TANDA TANGAN



Mengetahui:

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial

Dra. MC Candra Rismala Dibyorini, M.Si.

NIP. 170230173



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktavianus Bali

NIM : 19510025

Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes Di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan hasil karya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data dan hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah saya sebutkan dalam teks dan tercantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2023



Oktavianus Bali
Oktavianus Bali

19510025

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada tuhan yang maha kuasa atas berkat karunia-Nya dan segala kerendahan hati, sehingga skripsi ini dapat saya persembahkan kepada semua orang yang membantu dengan segala dedikasi dan upaya yang telah diberikan oleh mereka serta berperan penting dalam perjalanan akademik dan perkembangan pribadi saya.

1. Terima kasih untuk almarhum Nenek (opa) Mudda Tende dan Nenek (oma) Inya Tangu Holo yang selalu memberikan dukungan doa untuk saya.
2. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Robertus Rehi Bali dan Ibu Kristina Inya Kolong, serta keluarga Besar Lokalayo. Saya limpahkan terima kasih sedalam-dalamnya atas cinta, dukungan, dan motivasi serta dedikasi dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan nilai-nilai telah membentuk fondasi yang kokoh bagi kemajuan saya tanpa henti sepanjang perjalanan ini. Demikian juga, pengorbanan yang telah kalian lakukan untuk memastikan keberhasilan dan kebahagiaan saya.
3. Terima kasih juga untuk pacar saya Heldiana Susanti Kanda yang selalu mendukung untuk menyelesaikan perkajaan skripsi saya, baik secara material maupun tenaga untuk menyelesaikan skripsi saya.
4. Terima kasih kepada dosen Dra.Widati, Lic,rer,reg serta seluruh dosen Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan akademik dan inspirasi dan arahan yang berharga, wawasan mendalam, serta umpan balik yang konstruktif, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

5. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman Abang Boming, Abang Amirullah, Abang Inko, Irwanto, adik yanus, adik afri, adi holo, adik timo dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan, yang selalu hadir dalam perjalanan ini. Dukungan, kolaborasi, dan semangat belajar bersama telah membantu mengatasi tantangan akademik. Terima kasih atas diskusi, sharing pengetahuan, dan dukungan moral yang terus-menerus diberikan.
6. Saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN), Front Perjuangan Rakyat (FPR), Seruni, Sumba APMD dan Keluarga Mahasiswa Katolik Sumba (KMKS) Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri di luar lingkungan akademik. Melalui partisipasi organisasi ini, saya belajar banyak tentang kepemimpinan, kerja tim, dan tanggung jawab sosial.

Pada akhirnya, saya menyadari bahwa pencapaian skripsi ini tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi yang berharga dari orang tua, keluarga, organisasi, dosen, dan teman-teman. Saya merasa sangat beruntung memiliki mereka didalam hidup saya. Semoga persembahan ini menjadi ungkapan terima kasih yang tulus dan dapat menggambarkan rasa terima kasih yang mendalam atas peran mereka dalam mencapai pencapaian ini.

Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam perjalanan akademik ini. Semoga segala bentuk kontribusi dan dukungan yang diberikan dapat terus menjadi sumber inspirasi bagi saya dan bagi orang lain yang akan mengikuti jejak perjalanan akademik mereka.

MOTTO

Keadan Sosial membentuk Kesadaran Sosial

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam karya tulis skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Tetapi penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat diwujudkan bila tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Robertus Rehi Bali dan Ibu Kristina Inya Kolong yang telah rela berkorban tanpa pamrih dan membesarkan, mendidik, serta mendoakan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menempuh ilmu dan pengalaman secara akademik.
3. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Candra Rusmala selaku Ketua Prodi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

5. Ibu dosen Dra. Widati, Lic, rer, reg selaku dosen pembimbing yang memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan pengalaman serta gagasan yang untuk mendukung terselesaikan skripsi ini dengan baik.

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GAMBAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori.....	12
E. Metode Penelitian	23
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	31
A. Sejarah Kalurahan.....	31
B. Kondisi Geografis	33
C. Demografis	37
D. Sarana Prasarana Desa dan Budaya Kalurahan Guwosari	48
E. Profil Pemerintah Kalurahan.....	53
F. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)	58
G. Profil BUM Desa Guwosari Maju	62

BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	72
A. Deskripsi Informan	72
B. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera.....	73
C. Faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Guwosari Maju Sejahtera.	101
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
Lampiran.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Daftar Lurah Kalurahan Guwosari	32
Tabel II.2 Luas Wilayah	36
Tabel II.3 Orbitrasi	37
Tabel II.4 Jumlah Mata Pencaharian.....	38
Tabel II.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	39
Tabel II.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	40
Tabel II.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja	42
Tabel II.8 Data Penduduk Cacat Mental dan Fisik	43
Tabel II.9 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Balai Pengobatan.....	48
Tabel II.10 Sarana dan Prasarana Pendidikan	49
Tabel II.11 Sarana Olahraga.....	50
Tabel II.12 Budaya Kalurahan Guwosari	51
Tabel II.13 Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa	52
Tabel II.14 Pemerintah Kalurahan Guwosari.....	55
Tabel II.15 Profil Badan Permusyawaratan Desa	61
Tabel III.1 Identitas Informan	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Administrasi Kalurahan Guwosari	34
Gambar II.2 Peta Administrasi Kapanewon Pajangan.....	34
Gambar II.3 Peta Administrasi Kabupaten Bantul.....	35
Gambar II.4 Unit Usaha Go-Sari.....	66
Gambar II.5 Unit Usaha Warung Kita	67
Gambar II.6 Unit Usaha Banjaran.....	69
Gambar II.7 Unit Usaha Sari Artha.....	69
Gambar II.8 Unit Usaha Goza	70
Gambar II.9 Unit usaha Migunani	71

DAFTAR GAMBAR BAGAN

Gambar Bagan II.1 Struktur Organisasi Kalurahan Guwosari.....	57
Gambar Bagan II.2 Struktur Organisasi Bamuskal Kalurahan Guwosari	60
Gambar Bagan II.3 Struktur Organisasi BUMDes Guwosari Maju Sejahtera	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berada di antara samudra hindia dan samudra pasifik, diantaranya benua asia dan benua australia. Indonesia memiliki keberagaman yakni; dari suku, budaya, dan bahasa yang berbeda. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan, baik dari sumber daya manusia maupun alam yang dimungkinkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di setiap daerah sampai pada di pedesaan.

Dapat diketahui bahwa, secara keseluruhan penduduk Indonesia saat ini sekitar 70% yang hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral dari pembangunan tersebut diarahkan ke daerah kawasan pedesaan. Desa saat ini menjadi penggerak dan penentu atas keberhasilannya pembangunan pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dapat dipahami bahwa saat ini menjadi penentu kemajuan negara akan dimulai dari kemajuan yang berawal dari desa, (Lorosa,2017:26).

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, baik itu hak usul, hak tradisional ataupun hak lainnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Desa juga, memiliki tanggung jawab penuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat akan

menjadi solusi untuk mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi untuk dikembangkan, demi keberlangsungan kemajuan desa.

Dalam mengembangkan potensi pedesaan adalah mengutamakan perencanaan yang betul-betul matang dan tepat guna serta efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong kemandirian masyarakat desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai operasionalisasi dan perspektif yang berpusat pada rakyat, untuk memberikan peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil pembangunan, (Soetomo,2015:65-66).

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah penempatan manusia sebagai subyek yang mengamanatkan untuk penekanan keberpihakan pada kelompok yang tidak berdaya. Pemberdayaan merupakan perlawanan pembangunan yang pro-pertumbuhan diyakini terjadinya efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) ternyata tidak mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat, justru sebaliknya penyedotan dari bawah ke atas (*trickle up effect*) yang dikarenakan program-program direncanakan secara terpusat (*top down*) sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari bawah yang menjadi sasaran dari pembangunan, (Zubaedi, 2005:95-96). Dalam penjelasan Zubaedi (2005:97) pemberdayaan didalamnya mengandung nilai-nilai intrinsik dan instrumental di dataran individu dan kelembagaan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan hak-hak asasi untuk mendapatkan kemampuan dan mengontrol keputusan dalam menentukan nasibnya sendiri.

Dilihat posisi masyarakat yang kurang dihargai dengan menempatkan sebagai objek bukan sebagai subjek, sehingga terasa posisi masyarakat dalam posisi yang marginal, (Soetomo,2015:66). Oleh karena itu, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai proses untuk memberikan daya pada masyarakat, yang memiliki potensi, gagasan dan kemampuan yang membawa dirinya ke arah yang lebih baik untuk diberdaya, namun potensi-potensi tersebut terkadang tidak bisa untuk dikembangkan. karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, (Anwas 2013:4).

Memberdayakan masyarakat adalah melakukan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat di berbagai lapisan masyarakat bawah (*Grass root*), yang posisinya dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari kondisi yang sangat keterbelakangan. Pemberdayaan (*empowering*) diartikan sebagai kekuatan yang disuntik dalam memampukan dan memandirikan masyarakat yang sama sekali tidak berdaya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu konsep yang terkandung di dalam pembangunan ekonomi untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan komunitasnya. Hal ini, diperlukan adanya perhatian khusus dalam mendorong masyarakat untuk dapat menyadarkan kembali perencanaan dengan memposisikan dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Desa merupakan suatu wilayah yang memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya yang berbasis ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi hal yang terpenting untuk mengurangi berbagai kesenjangan

masyarakat, baik itu dari pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin maupun kesenjangan antara kota. Disamping itu, pembangunan ekonomi pedesaan menjadi jembatan suatu program pembangunan yang berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang Pendidikan, Kesehatan, maupun perumahan, (Rani, 2018).

Maka tujuan utama dari cita-cita pemerintah indonesia khususnya untuk masyarakat pedesaan tentunya, segera direalisasikan dengan melalui kebijakan dan program. Akan tetapi pembangunan di pedesaan masih minim, sehingga sampai saat ini masih banyak desa yang dikategorikan desa tertinggal, terbelakang dan termiskin (3T), dikarenakan tingkat intervensi pemerintah terlalu besar sehingga mengakibatkan daya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menjalankan mesin perekonomian mengalami kesulitan dalam pembangunan ekonomi.

Hal ini, sealur dengan pendapat bahwa kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat diketahui bahwa tidak sepenuhnya untuk diperhatikan tentang kebutuhan masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk berinovasi dalam membangun kepedulian dan kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Menurut Sandiasa dalam (Kadek Darwita:2018) menjelaskan bahwa sistem dan mekanisme dalam kelembagaan ekonomi pedesaan tidak akan berjalan efektif bila pada akhirnya mengalami suatu ketergantungan bantuan subsidi/sosial pemerintah sehingga mematikan semangat usaha dan kemandirian masyarakat.

Berdasarkan dengan asumsi tersebut, desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi sebagai pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa yaitu, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai wadah pemerintah dan masyarakat desa secara seimbang melaksanakan program perekonomian di tingkat desa. Menurut Sujarweni (2019) menjelaskan bahwa badan usaha milik desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha yang bergerak dibidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Demikian, diatur didalam UU No 6/2014 tentang desa, yang disinggung Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah desa dan dipisahkan dari pemerintah desa guna untuk mengelola seluruh aset-aset dan jasa pelayanan serta usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

Landasan hukum mengenai tata kelola BUMDes tersebut juga diperjelas dalam Permendesa No. 4/2015, yang secara terperinci dijelaskan mengenai proses pendirian BUM Desa bahwa yang berhak untuk mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan serta pada laporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes yang diatur dalam permen tersebut. Seperti yang dijelaskan didalam Kementerian Negara

Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan suatu perubahan pembangunan daerah yang sebelumnya berbasis pada Kawasan, namun saat ini sepenuhnya berbasis pada pedesaan (*Based on village*).

Berhubungan hal itu, maka prioritas dari Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan mencakup, pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana. Dengan skala prioritas tersebut dapat menstimulasikan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga usaha desa salah satunya adalah BUM Desa.

Diketahui, pada akhir Desember tahun 2018 tercatat sekitar 61% Desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau berbentuk 45.549 Unit Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Jumlah ini meningkat secara drastis dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dengan demikian, dari jumlah BUMDes yang begitu meningkat, diharapkan ada upaya dalam memperbaiki pembangunan pedesaan, meskipun masih ada beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berkembang secara maksimal sesuai harapan. (<http://www.detiknews.com/Kemdes>).

Berdasarkan data diatas, dengan semakin berkembangnya jumlah desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), maka dimungkinkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, dengan meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mengoptimalkan dalam

memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah daerah tentang arti penting Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bagi kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan hampir seluruh kawasan desa yang tersebar di Indonesia, begitu juga dengan salah satu desa yang bernama Desa Guwosari, berlokasi di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sejak tahun 2017 dan sudah menjalankan usaha. Jenis usaha yang dijalankan BUM Desa tersebut meliputi, GOZA (Even Organizer), unit Banjaran (Pariwisata, Sejarah dan Budaya), unit Go-Sari (Pengelolaan sampah), Migunani (Perdagangan, pengadaan barang dan jasa), Unit Warung Kita (Jasa Boga), dan Sari Atha (jasa Keuangan).

Keberadaan BUMDes menjadi jembatan penghubung dalam mendukung perekonomian masyarakat serta meningkatkan keterampilan dan mendorong masyarakat berkreasi. Di lain sisi juga, untuk meningkatkan pendapatan asli desa (APDesa) dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa yang cukup beragam di berbagai sektor, antara lain, sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan dan perindustri. Hasil pertanian, menjadi program unggulan desa guwosari yang terdiri dari tanaman; padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, kadelai, dan ubi jalar. Selain pertanian, kegiatan peternakan juga

dikembangkan di desa guwosari yaitu; peternakan ayam buras dan broiler. Kemudian di perikanan adalah budidaya ikan gurami. Potensi perekonomian yang lain adalah di sektor industri kecil yang diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu, komoditas unggulan (Mebel dan Keramik), komoditas andalan (Batok Kelapa, Kerajinan Kayu, Dan Tatah Sungging) dan komoditas diunggulkan (Bambu, Blangkon, Pengolahan Hasil Ikan dan Emping).

Namun fakta yang terjadi dilapangan, BUM Desa Guwosari Maju belum mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dikarenakan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat masih minim, sarana dan prasarana, modal usaha dan ketersediaan pasar. Dari empat permasalahan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dari permasalahan diatas, diketahui bahwa BUM Desa Guwosari Maju masih mengalami kendala. Untuk mendukung permasalahan diatas, sesuai dengan hasil penelitian Suhud Dharmawan (2020), dimana dia menjelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUM Desa) belum maksimal, seperti memberikan pelatihan dan modal untuk menjalankan usaha,(Suhud, 2020).

Demikian juga, studi yang dilakukan oleh Ristiani dan Amin Yusuf (2020) mengemukakan bahwa kurang maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUMDes dan kurang memadai dana yang disediakan oleh pemerintah, (Ristiana & Amin, 2020).

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya pemberdayaan dengan memperhatikan potensi ada untuk mendukung pengembangan perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Guwosari Maju khususnya, harus mampu menjadi pendorong dalam mendukung perekonomian masyarakat. Kesejahteraan masyarakat hanya terwujud apabila BUMDes mampu mengelola potensi tersebut. Demikian juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mensejahterahkan masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (skil), penyedia akses pasar serta modal usaha masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka sangat penting untuk diteliti, karena sejauh pengamatan belum ditemukan penelitian yang mampu melihat strategi yang dilakukan oleh BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. dengan dasar itulah, kemudian peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana BUM Desa Guwosari Maju ini melakukan pemberdayaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul tentang “Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Guwosari Maju Sejahtera dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan pertanyaan untuk mengantar pada penjelasan terhadap masalah yang akan diteliti;

1. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guwosari Maju Sejahtera di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guwosari Maju Sejahtera?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guwosari Maju Sejahtera di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta!
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guwosari Maju Sejahtera!

1.2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini, akan memberikan manfaat terhadap mahasiswa, kampus, pengelola BUM Desa pada umumnya

secara ilmiah dan juga praktis terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, ada dua manfaat dalam penelitian ini yang akan diperoleh sebagai berikut;

a. Manfaat Ilmiah

1. Manfaat penelitian ini, akan membantu mahasiswa, kampus dan pengelola BUM Desa dalam memahami pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes pada umum. Kemudian juga dijadikan acuan pemerintah desa dan pengurus BUM Desa Guwosari Maju ataupun pihak terkait dalam BUM Desa.
2. Penelitian ini juga akan dijadikan sebagai bekal, bagi mahasiswa dan menambah pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Guwosari Maju sejahtera.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat secara praktis, dalam penelitian ini, dapat dijadikan sebagai acuan dan motivasi yang berguna dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.
2. Penelitian ini dapat dijadikan acuan pada pengurus BUMDes dan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

D. Kerangka Teori

1.1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan peningkatan harkat dan martabat dari lapisan masyarakat paling bawah untuk melepaskan diri dari keterbelakangan dengan memampukan dan memandirikan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Menurut Samuel Paul (1987:24) memberikan definisi pemberdayaan ekonomi masyarakat dibagi menjadi dua, antara lain; partisipasi aktif dan kreatif. Partisipasi mengacu pada sebuah proses keaktifan dengan kelompok sasaran, sedangkan kreatif akan dipengaruhi dengan arah dari pelaksanaan. Dengan definisi tersebut Cohen & Uphoff, (1999) menjelaskan dengan pendapat Samuel Paul diatas bahwa atas pandangan dan keterlibatan masyarakat mulai tahap pembuatan keputusan, penerapan, keputusan akhir dan sampai pada evaluasi.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Istilahkan pemberdayaan atau *empowerment*, sangat bersentuhan dengan kekuasaan. Kekusaan seringkali dikait dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka, (Edi Suharto, 2014:57).

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah

(powerless) untuk mengurangi kekuasaan pada pihak yang berkuasa *(powerful)* sehingga terjadi adanya keseimbangan. Menurut Rappaport (1984) pemberdayaan adalah suatu cara yang dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai dan menentukan hidupnya sendiri. Kemudian Parsons (1994) menjelaskan pemberdayaan merupakan penekanan orang untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi hidupnya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian, (Edi Suharto, 2014:59).

Secara terperinci Slamet (2003) memberikan penekanan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membangun dan memperbaiki kehidupan masyarakat serta memampukan. Dalam istilah mampu disini dengan mengandung makna; berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan serta mampu mengambil resiko dalam bertindak, (Anwas, 2014). Kemudian menurut Mardika dalam (Purnamasari & Ma'ruf, 2020) pada hakikatnya pemberdayaan merupakan kesiapan masyarakat untuk mampu berpartisipasi secara aktif di setiap program atau kegiatan pembangunan yang orientasinya memperbaiki mutu kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun mental.

Berdasarkan dengan pengertian di atas dipahami bahwa pada dasarnya pemberdayaan tidak menjadikan masyarakat bergantung pada program yang terpusat dari pemerintah itu sendiri, namun

pemberdayaan mempunyai orientasi yang jelas untuk menjadikan masyarakat yang berdaya dan mampu untuk menentukan nasibnya sendiri. Di Lain sisi, pemberdayaan juga adalah memampukan dan menguatkan masyarakat dalam menentukan masa depannya kedalam suatu perubahan yang lebih baik.

Sebagai proses dalam pemberdayaan masyarakat ada tiga tahapan yang perlu diperhatikan yakni;

- a) Tahapan penyadaran; yaitu masyarakat diberikan pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik
- b) Tahapan pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahapan untuk masyarakat dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan
- c) Tahapan pendayaan (*empowerment*) adalah tahapan dalam memberikan kesempatan atau otoritas masyarakat dalam menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka

Dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi penting dengan menyusun program dari masyarakat sesuai kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan masyarakat utamanya pada kelompok lemah atau belum berdaya dengan sekaligus memperhatikan dampak program terhadap lingkungan.

1.2. Faktor Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Untuk tercapai pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat beberapa faktor yang mendukung seperti yang dikemukakan oleh Hutomo dalam (Fauziah & Rifa, 2021), antara lain;

a. Sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting di setiap program pemberdayaan ekonomi, yang dimana sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi harus mendapat penanganan yang serius karena menjadi sumber kekuatan ekonomi

b. Sumber daya alam (SDA)

Sumber daya alam (SDA) merupakan sumber daya pembangunan yang cukup penting didalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dilihat bahwa dengan SDA yang melimpah menjadi sumber keberlangsungan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada alam.

c. Permodalan

Dalam permodalan merupakan salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Namun demikian ada hal yang perlu dicermati dalam aspek pemodelan yaitu, bagaimana dengan pemberian modal tidak ada

ketergantungan bagi masyarakat serta mendorong usaha mikro, usaha kecil maupun usaha yang besar yang berkembang maju. Cara ini cukup baik dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan dalam keberlangsungan perekonomian masyarakat dengan memberikan subsidi bunga dan pinjaman lembaga.

b. Prasarana produksi dan pemasaran

Dalam aspek ini adalah bagaimana mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha masyarakat. Jika hasil produksi tidak dapat dipasarkan, maka sangat berdampak pada usaha-usaha sehingga terasa akan sia-sia. Oleh karena itu, sebagai komponen yang mendorong di dalam bidang ekonomi dengan ketersediaan prasarana dan pemasaran akan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dalam keberlanjutan usaha masyarakat.

1.3. Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Untuk mencapai suatu keberhasilan suatu program tersebut, dalam implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diperlukan adanya beberapa dimensi yang dipakai sebagai bentuk pendekatan. Seperti yang dikemukakan Hutomo, (Fauziah & Rifa, 2021) beberapa pendekatan yang meliputi yakni;

a. Pemberian Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah permodalan. Lambatnya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, usaha kecil, dan menengah menjadi salah satu

penyebab lambatnya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dengan melalui aspek pemberian bantuan modal dengan tujuan tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat. pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan

b. Bantuan pembangunan prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab itu, komponen penting didalam usaha pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, bisa meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, sangat diperlukan proyek pembangunan prasarana sebagai pendukung desa tertinggal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan sangat diperlukan. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah dengan usaha besar.

d. Penguatan kelembagaan

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Oleh karena itu, dengan melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

e. Penguatan kemitraan usaha

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang

tinggi hanya ada jika ada keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi masing-masing pihak akan diberdayakan.

Dalam ini hal ini, Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau pun kondisi masyarakat yang lebih baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan dan meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam membangun daya masyarakat dalam perekonomian dengan memberikan suatu dorongan, motivasi serta menggali potensi yang dimiliki.

Pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan dengan cara penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran dengan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkat kemampuan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, (<https://www.pelajaran.co.id>.)

1.4. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Muryani dalam (Samadi et al., 2015) Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menjadi jembatan untuk memperkuat perekonomian serta membangun suatu keeratan sosial masyarakat desa.

Dengan demikian sejalan yang dijelaskan oleh Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh masyarakat, memperkuat ekonomi desa dan meningkat pendapatan asli desa (PADes). BUMDes sebagai mampu mengedepankan kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dan penyediaan pelayanan, (Suharyanto, 2014:5). Dalam Forum Pengembangan Pembaharuan (FPPD) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dimaksudkan dalam pendiriannya dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Permendagri, No 39/2010)

Menurut Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (2014:11) hukum pembentukan BUM Desa

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- e. Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) Tentang BUMDes

Tujuan pendirian BUM Desa adalah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa (PADes) namun pada pendiriannya tersebut didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Purnomo dalam (Samadi et al., 2015) dibagi menjadi 4 maksud dan tujuan pembentukan badan usaha milik desa antara lain; 1). Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian desa; 2). Peningkatan sumber pendapatan asli desa (PADes); 3). Menyelenggarakan dengan penyedia jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa; 4) sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa. Sedangkan Menurut Herry Kamaroesid pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya yang menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola desa dan kerja sama antar desa.

Dalam Pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa dengan mengembangkan produk usaha desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa untuk dimanfaatkan potensi yang demi kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dengan memberikan akses pendanaan dan informasi pasar dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan serta fasilitas dalam pengembangan usaha mikro guna meningkatkan produktivitas masyarakat.
- d. Kerja sama antara desa dan/atau pihak ketiga melalui musyawarah bersama antara 2 desa atau lebih.

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar dan menjadi mitra penyedia jaringan pasar untuk mendukung perekonomian.
- f. Membuka lapangan pekerjaan sebagai untuk mengantisipasi kondisi yang memburuk perekonomian desa.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan PADes yang merata dan berkeadilan dan memberikan perhatian dalam pelaku usaha termasuk membina lingkungan dengan usaha kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (Purnomo, n.d.).

Prinsip-prinsip untuk mengelola BUM Desa, dikolaborasikan dan diuraikan agar dipahami dan presepsikan bersama. Menurut Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa (2017) terdapat (6) prinsip dalam mengelola BUMDes antara lain:

- a. *Kooperatif*; semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama yang baik dalam pengembangan demi keberlangsungan hidup usaha masyarakat dan juga BUMDes.
- b. *Partisipatif*; semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara suka rela atau meminta dukungan dan

kontribusi sebagai kekuatan untuk mendorong kemajuan BUM Desa

- c. *Emansipasi*; semua yang terlibat dalam BUM Desa diperlukan kesamaan tanpa memandang golongan suku dan agama.
- d. *Transparan*; aktivitas berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dapat diketahui segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
- e. *Akuntabel*; seluruh kegiatan usaha harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif
- f. *Sustainable*; kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa, (Suharyanto & Hastowiyono, 2014, p. 23)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sebagai bentuk pendekatan deskriptif untuk mengkaji informasi. Menurut Wardiyanta (2006:5), penelitian deskriptif adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena sosial/alam secara sistematis, jujur, dan akurat. Dengan penelitian yang digunakan ini untuk menguji suatu hipotesis atau menjawab pertanyaan dengan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat,

Menurut Usman (2009:129-130) penelitian deskriptif adalah deskripsi atau penokohan kembali fenomena. Meskipun demikian, jenis penelitian ini

adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Usman, dalam penelitian ini interpretasi kembali didasarkan pada pendapat narasumber, dan ditanyakan pernyataan penelitian, kemudian latar belakang narasumber dianalisis sehingga berperilaku seperti itu, mereduksi, pendahuluan, kesimpulan, dan validasi.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian menginterpretasikan, menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan data empiris.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan suatu permasalahan atau perihal yang dikaji untuk diteliti. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guwosari Maju, dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh BUMDes, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Definisi Konseptual

1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dialami masyarakat dengan dengan mendukung dan memampukan serta memandirikan masyarakat desa atau dengan kata lain, mampu memperbaiki situasi dan kondisi

masyarakat kedalam tindakan proses pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa.

2) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu lembaga usaha yang dimiliki oleh desa, kemudian dikelola atas inisiatif masyarakat dan pemerintah desa dengan segala upaya untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.

c. Definisi Operasional

Agar peneliti lebih fokus dalam pengambilan informasi, data yang dibutuhkan, maka dapat dilihat dari indikator: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Guwosari Maju Sejahtera, Kelurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera
 - a) Pemberian modal
 - b) Bantuan pembangunan sarana prasarana
 - c) Bantuan Pendampingan
 - d) Penguatan kelembagaan
 - e) Penguatan kemitraan usaha
2. Faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Guwosari Maju Sejahtera.

d. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu; berlokasi Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Subyek Penelitian

Dalam penentuan sumber/subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi atau data oleh peneliti dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti orang-orang yang dianggap penting dan terlibat langsung. Informan dalam penelitian ini akan memberikan informasi yang diperlukan sesuai kebutuhan peneliti selama proses penelitian.

Menurut Arikunto (2006:145) menjelaskan bahwa subyek penelitian merupakan subjek yang akan dituju oleh peneliti untuk diteliti. *Purposive sampling* merupakan Teknik dalam pengumpulan sampel atau sumber data yang akan dipertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:218).

Dalam hal ini, informan yang diminta untuk memberikan keterangan keseluruhan komponen yang terdapat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik (BUM Desa) Kalurahan Guwosari. Komponen yang dimasukkan adalah:

- a. Pemerintah Kalurahan : 2 Orang
- b. Pengurus BUMDes : 2 Orang
- c. BAMUSKAL : 1 Orang
- d. Masyarakat : 4 Orang

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang memang terlibat langsung atau menjadi pelaku dalam pengelolaan BUMDes dan juga dalam usaha masyarakat. Kemudian mampu mempertanggungjawabkan atas informasi tersebut.

f. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian untuk menghasilkan data yang kredibilitas atau yang dapat dipercaya. Oleh karena itu dalam tahapan ini perlu dilakukan dengan cermat sesuai prosedur penelitian, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu;

a) Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara pengamatan dan menggunakan seluruh indera terhadap obyek dan subyek. Melalui observasi dapat mempelajari perilaku dan makna perilaku itu sendiri (Arikunto, 1998: 146)

Dalam penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan peneliti tanpa menggunakan pedoman observasi. Dengan demikian peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan, (Bungin 2007:144).

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk berdialog dan bertukar informasi dan ide melalui dengan tanya jawab, yang dilakukan dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara sesuai prosuder penelitian (Arikunto, 1998: 146). Dalam hal ini diketahui bahwa wawancara merupakan suatu Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ataupun informasi.

c) Dokumentasi

Menurut Lexy J. Moleong (2005:216) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan suatu metode yang dipakai dalam pengumpulan data yang berdasarkan dengan catatan-catatan tertulis (dokumen) ataupun rekaman (*record*) di daerah penelitian. Rekaman dipakai dalam setiap pertanyaan yang tertulis dan disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan mencari informasi. Sedangkan dokumen merupakan bahan yang tertulis maupun bisa berbentuk film yang akan digunakan sebagai sumber informasi dan data.

Dalam lexy J. Moleong (2005:216-2017), dokumen dan rekaman digunakan untuk keperluan penelitian dengan alasan dapat mempertanggung jawabkan sebagai berikut:

1. Dokumen dan *record* digunakan merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong.

2. Berguna untuk dijadikan bukti dalam pengujian
3. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif, karena sifatnya yang ilmiah sesuai konteks, lahir dan berada dalam konteks.
4. Keduanya tidak reaktif, sehingga sukar ditemukan dengan teknik pengajian isi.
5. Hasil pengajian akan membuka kesempatan dengan memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

g. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada analisis data lapangan melalui proses diharapkan untuk mengidentifikasi melalui penyajian yang jelas dan terstruktur sehingga dapat dikomunikasikan relevansinya dari penelitian yang dikemukakan Miles dan Huberman 1992: 16-20 tentang interaktif model menganalisis data ke dalam tahap-tahap sebagai berikut;

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu data yang dikumpulkan dengan berupa kata-kata yang disampaikan oleh informan. Bukan dengan rangkai kata, karena akan dikumpulkan dengan cara (observasi, wawancara, dokumen, rekaman). Kemudian diproses sebelum digunakan melalui (pencatatan, pengetikan atau alat tulis).

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses dalam pemilihan, perumusan data serta perhatian penyederhanaan kalimat, pengestrakan, dan informasi data-data kasar yang muncul sebagai catatan lapangan akan direduksi untuk penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, reduksi data merupakan suatu Teknik dalam analisis untuk menajamkan, membuang sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang ditarik dapat diverifikasi baik.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang akan yang dapat memberikan kemungkinan bahwa adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. disusun secara terpadu dan mudah dipahami, kemudian memberikan kemungkinan dengan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan.

d. Menarik Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti akan berusaha untuk menganalisa dan mencari pola hubungan persamaan dalam hal-hal yang sering timbul yang akan dituangkan ke dalam kesimpulan.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kalurahan

Sejarah kelurahan guwosari dapat dilihat sebelum pada masa penjajahan tahun 1945 di Ngayogyakarta. Pada masa itu, sistem pemerintahan yang dominan adalah kerajaan. Setelah Indonesia merdeka, banyak terjadi perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan Sistem pemerintah di berbagai wilayah, termasuk Desa guwosari. Pada awalnya, Desa Guwosari terdiri dari dua kuarahan yaitu, kaluarahan selarong dan kaluarahan wonodirjo, dengan lurah (kepala desa) dipegang langsung oleh kalurahan iroyudan. Meskipun demikian, dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan dan administrasi desa. Perubahan tersebut terkait dengan implementasi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berdasarkan pada prinsip otonomi daerah setelah Indonesia merdeka.

Penting Nya mencatat tentang sejarah desa tersebut dilihat bahwa, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pemaduan pembagian yaitu pembagian antara pembagian Selarong dengan pembagian Iroyudan, dan penggagas pembagian ini adalah kepala jalan Wonodirjo. (Jalan Selarong). Hasil peleburan ini adalah desa Guwosari yang berarti “Guwo” adalah sebuah gua yang terletak di Selarong yang merupakan tempat persembunyian Pangeran Diponegoro pada masa penjajahan dan sekarang dikenal sebagai Obyek Wisata Gua Selarong, “Sari” adalah inti dari dua divisi Lula pertama adalah Pak Sukwardi dari desa kecil Kembangputihan. Desa Guwosari memiliki Gua Selarong yang terletak di

desa Kembangputihan, sebelah utara dari balai desa Guwosari. Masyarakat Desa Guwosari memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang ditunjukkan selama penelitian di kalurahan Guwosari peneliti sering kali disambut dengan ramah dan sangat sopan oleh penduduk setempat. Demikian juga, masyarakat Guwosari pada umumnya terbuka dan selalu bersedia untuk membagi informasi mengenai sejarah, budaya dan kehidupan mereka sehari-hari. Namun disisi lain ada juga individu yang tidak menerima ketika diwawancara mungkin dikarenakan kurang pengetahuan atau mungkin alasan pribadi.

Dilihat dari hasil observasi peneliti lapangan, infrastruktur jalan Jalan Guwosari sudah cukup berkembang, jalan sudah di aspal, banyak bermunculan orang-orang terkenal dan kelompok wisata.

Tabel II.1

Daftar Lurah Kalurahan Guwosari

No	Tahun Periode	Nama Lurah	Padukuhan
1	1945-1961	Sukrawardi	Kembang Putih
2	1961-1989	Ngumar	Kembang Putih
3	1989-1992	Budiman	Prigading
4	1992-1995	M.Daim Raharjo	Karangber
5	1995-1997	Zainuri	Kembang Putih
6	1997-2000	M.Zainuri	Iroyudan
7	2000-2002	Drs.Abani	Kalakijo
8	2002-2012	Abdul Basyir, S.Ag	Santan
9	2012-2018	M.Muh Suharto	Iroyudan
10	2018-2024	Masduki Rahmad, S.IP	Ioyudan

Sumber: Kalurahan Guwosari 2023

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa di perjalanan Guwosari, sepuluh kepala desa yang berganti setiap tahun. Pada tahun 1945-1961 kepala desa adalah bapak Sukrawardi yang mengabdikan dan mengurus desa guwosari selama 17 tahun.

tahun 1961-1989 kepemimpinan desa guwosari diambil alih oleh bapak ngumar yang berumur kurang lebih 28 tahun. Kemudian tahun 1989-1992 adalah Bapak Budiman kurang lebih 3 tahun menjabat sementara. tahun 1992-1995 adalah Bapak M. Daim Raharjo menjabat selama 3 tahun 1995-1997 dan digantikan oleh Bapak M. Zainuri selama 3 tahun berikutnya, selama tahun 1997-2000. Abani digantikan oleh Bapak Abdul Basyir, S.ag untuk masa jabatan 2 tahun pada tahun 2000-2002 untuk masa jabatan 10 tahun pada tahun 2002-2012 dan kepala desa berikutnya adalah Bapak H. Muh Suharto untuk masa jabatan 5 tahun pada tahun 2012-2018, Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Masduki Rahmat dari S.IP periode 2018-2024 hingga mempresentasikan 5 tahun. Kepala Lurah saat ini bercirikan gaya dan kepemimpinan yaitu sifat yang ramah terhadap masyarakatnya. Beliau juga merupakan kepala lurah yang masih sangat muda diantara anggota dan pengurus desa Guwosari. Namun, tidak menutup kesempatan bagi masyarakat guwosari untuk masuk dalam arena kepemimpinan dan berjuang untuk memajukan desa.

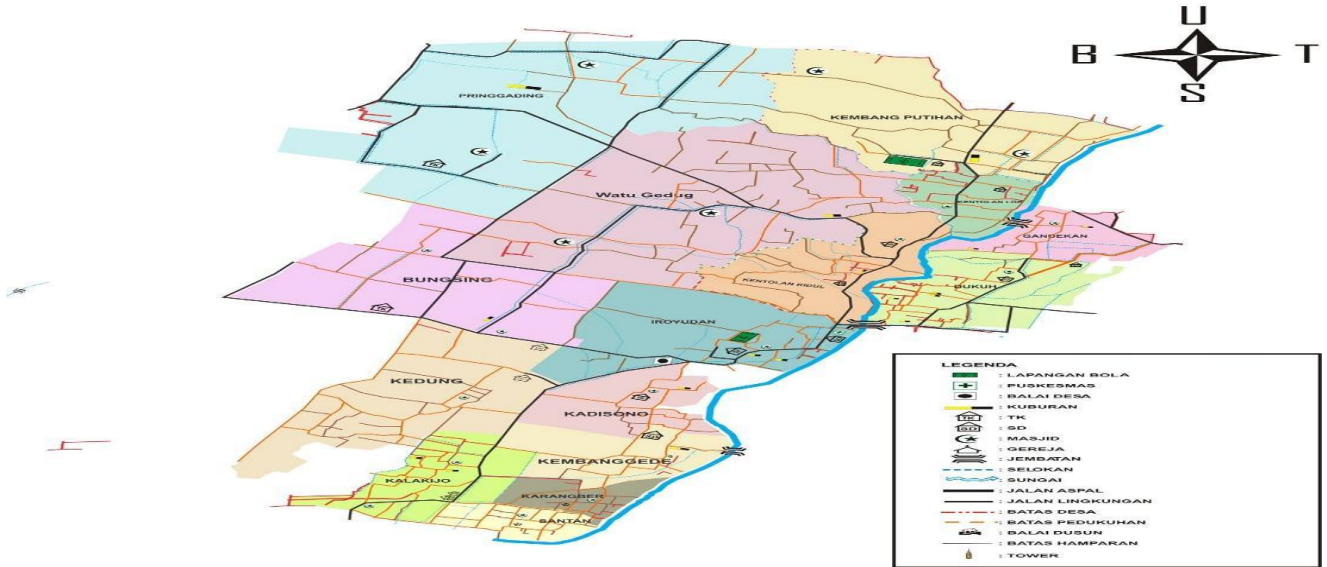
B. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kalurahan Guwosari saat ini berada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY dengan berdasarkan letak wilayah kalurahan guwosari sesuai dengan peta administrasi dibawah ini;

Gambar II.1

peta administrasi kalurahan Guwosari

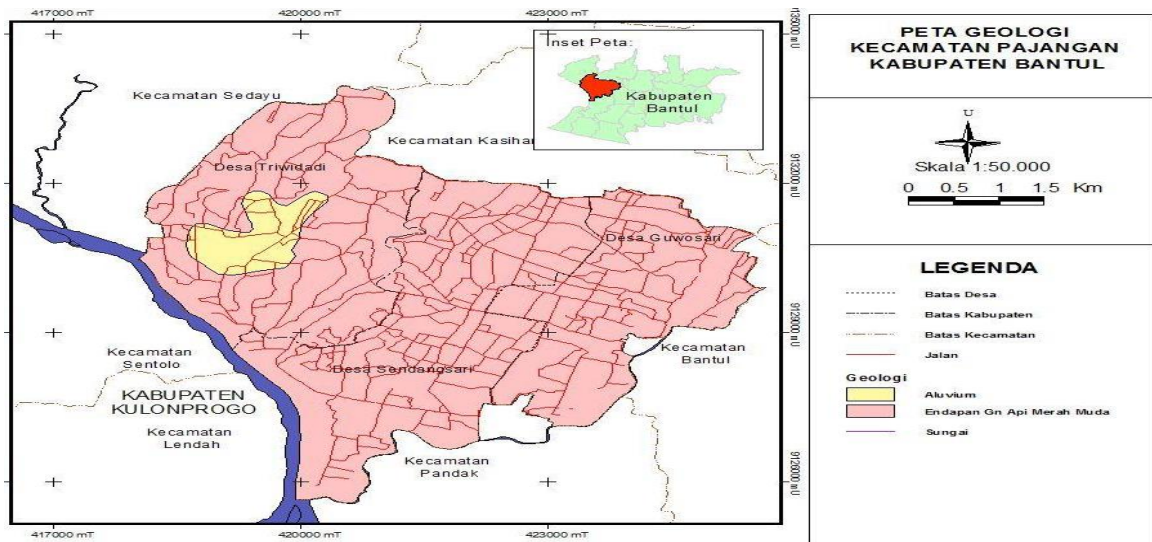
PETA DESA GUWOSARI



Sumber; Google Maps 2023

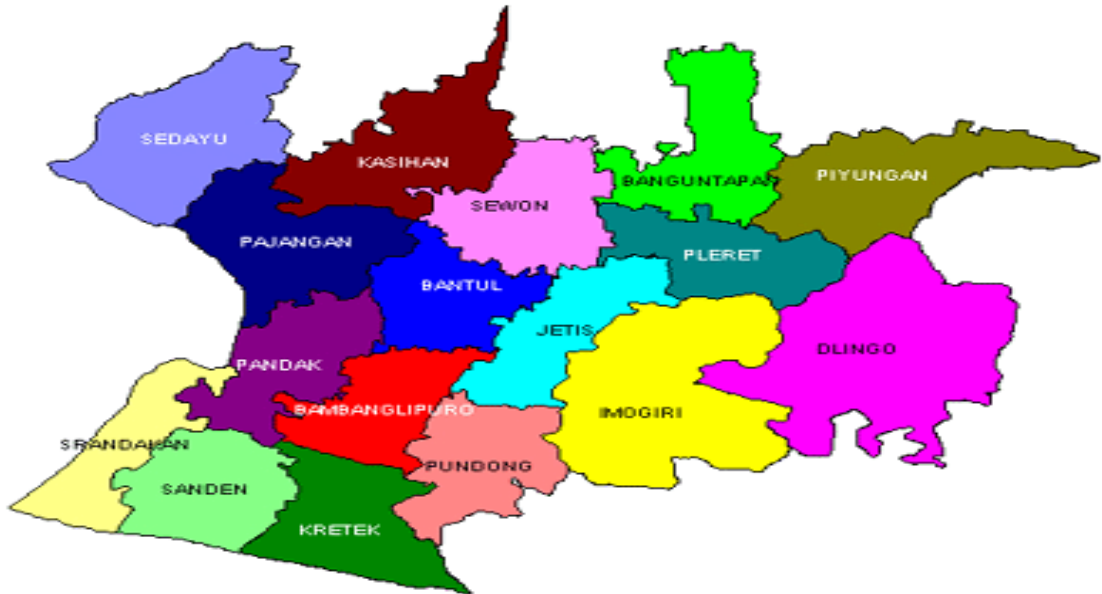
Gambar II.2.

Peta Administrasi Kapanewon Pajangan



Gambar II.3

Peta Administrasi Kabupaten Bantul



Sumber: Google maps kusnantokarasan.com 2023

Kalurahan Guwosari yang terletak di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul memiliki batas wilayah dan luas kalurahan Guwosari dengan posisi lahan 830.011 Hektar, dengan batas kaluarahan

- Sebelah Utara : Kalurahan Bagujiwo Kapanewon Kasihan
- Sebelah Selatan : Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
- Sebelah Barat : Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan
- Sebelah Timur : Kalurahan Bantul dan Ringinharjo Kapanewon Bantul

Diketahui bahwa jarak 3,00 Km menuju Kapanewon Pajangan dan 2,50 Km jarak dari pusat pemerintahan kabupaten.

a. Luas Wilayah

Tabel II.2

Luas Wilayah Kalurahan Guwosari

No	Padukuhan	RW	RT
1	Kembangputih	001	1.2.3.4.5.6
2	Kentolan Lor	002	7.8.9.10.11.12
3	Kentolan Kidul	003	13.14.15.16
4	Gandekan	004	17.18.19.20.21
5	Dukuh	005	22.23.24.25.26.27
6	Iroyudan	006	28.29.30.31.32.33
7	Kadisono	007	34.35.36.37
8	Kembanggede	008	38.39.40.41
9	Karangber	009	42.43.44.45
10	Santan	010	46.47.48.49
11	Kalakijo	011	50.51.52.53.54.55
12	Kedung	012	56.57.58.59
13	Bungsing	013	60.61.62.63
14	Watugede	014	64.65.66.67.68
15	Prigading	015	69.70.71.72.73.74.75.76.77

Sumber: *Profil Kaurahan Guwosari 2023*

Kalurahan Guwosari terdiri 16 RW dan 77 RT yang mencakup 16 Padukuhan. Data diatas memberikan gambaran cukup jelas tentang struktur administrasi kaluarahan Guwosari termasuk jumlah RW dan RT di setiap padukuhan, dengan pembagian administrasi dan data demografis di setiap pedukuhan, peneliti dapat melanjutkan analisis dan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat guwosari, seperti sosial, ekonomi dan budaya di masing padukuhan.

b. Orbitasi

Tabel II.3

Orbitasi Kalurahan Guwosari

Jarak dari pusat pemerintahan Kapanewon Pajangan	3,00 km
Jarak dari pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Bantul	2,50 km
Jarak dari pusat ibu kota Provinsi DIY	17,00 km

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2023

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa kalurahan Guwosari memiliki jarak sejauh 3,00 Km dari ibu kota kecamatan Pajangan. kemudian jarak dari ibu kota kabupaten Bantul adalah 2,50 Km, sedangkan jarak dari ibu kota Provinsi DIY sejauh 17,00 Km. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jarak antara kalurahan Guwosari dengan ibu kota kecamatan dan provinsi tergolong cukup jauh. Dalam perjalanan menuju ibu kota kecamatan Pajangan, diperlukan waktu sekitar 45 menit dengan memperhitungkan jarak sejauh 3,00 Km. Begitu pula ketika menuju ibu kota kabupaten Bantul, meskipun jaraknya lebih pendek, yaitu 2,50 Km, tetap memerlukan waktu yang serupa. Apabila ingin mencapai ibu kota Provinsi DIY, perjalanan akan lebih panjang dengan jarak 17,00 Km, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapainya.

C. Demografis

Pemahaman akan pentingnya kependudukan dalam pembangunan merupakan hal ini sangat relevan. Penduduk kalurahan Guwosari, memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik dan memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan baik di pedesaan maupun

perkotaan. Penduduk yang memiliki kualitas tinggi dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan inovatif

a. Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah penduduk dengan berdasarkan Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Guwosari sekitar 4.538 KK. Kemudian Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin;

- Laki-laki : 6. 727 Jiwa
- Perempuan : 6. 708 Jiwa
- Jumlah Total : 13. 435 Jiwa

b. Jumlah penduduk Kelurahan Guwosari berdasarkan mata pencaharian

Tabel II.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencaharian	Jumla Penduduk
1.	Petani	810
2.	Pegawai Negeri Sipil	236
3.	Peternak	253
4.	Dokter Swasta	34
5.	TNI	25
6.	POLRI	40
7.	Karyawan Perusahaan Swasta	1.346
8.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	21
9.	Wiraswasta	1.168
10	Tidak Mempunyai Pekerjaan	492
11	Pelajar	3.587
12	Ibu Rumah Tangga	1.078
13	Buruh Harian Lepas	4.255
Jumlah Total		13.435

Sumber: *Profil Kalurahan Guwosari 2023*

Dari data yang disajikan di atas, menunjukkan pekerja swasta merupakan paling banyak diikuti oleh penduduk Kalurahan Guwosari. Hal ini

menunjukkan adanya sektor swasta yang berkembang dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat. sedangkan pekerja seni memiliki jumlah paling sedikit. Disisi lain, data atas juga menunjukkan adanya tingkat pengangguran yang cukup tinggi, sehingga dapat diindikasikan adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup di daerah yang disebabkan kurangnya akses terhadap modal, keterampilan kewirausahaan, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan swasta untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah penting yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, langkah konkret yang bisa diambil adalah pendirian BUM Desa dengan berbagai jenis usaha. Sehingga menciptakan peluang kerja baru dan mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal.

c. Jumlah Penduduk Kalurahan Guwosari berdasarkan Agama

Tabel II.5
Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	13.048
2.	Kristen	139
3.	Katolik	243
4	Budha	3
5	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	2
Jumlah Total		13.435

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2023

Dari data yang disajikan, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Guwosari didominasi agama Islam. Meskipun demikian, data juga

menunjukkan adanya sejumlah penduduk yang menganut agama Katolik, Kristen, dan Budha.

Dari data diatas, disimpulkan bahwa kehadiran komunitas agama Katolik dan Kristen menunjukkan adanya keragaman agama yang mencerminkan tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, agama Budha juga menambahkan warna keberagaman agama meskipun jumlahnya sangat sedikit, namun kehadiran komunitas Buddha menjadi bukti terciptanya pluralisme agama di wilayah tersebut. maka dari itu, keberagaman agama dapat menjadi sumber kekuatan dalam memperkuat persatuan dan kerja sama dengan dukungan dan pemahaman yang saling melengkapi antara berbagai agama dapat menciptakan iklim harmoni dan solidaritas di kalurahan tersebut.

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kalurahan Guwosari

Tabel II.6 Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Belum masuk TK	656
2.	Sedang TK/play group	362
3.	Sedang sekolah	1.533
4.	Tidak tamat SD	1.422
5.	Tamat SD/ sederajat	1.719
6.	Tidak tamat SLTP	3.107
7.	Tamat SLTA	528
8.	Tamat SMP/ sederajat	315
9.	Tamat SMA/ sederajat	3.498
10.	Tamat D-1/ sederajat	135
11.	Tamat D-3/ sederajat	63
12.	Tamat S-1/ sederajat	81
13.	Tamat S-2/ sederajat	16
Jumlah Total		13.435

Sumber: *Profil Kaurahan Guwosari 2023*

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Guwosari memiliki tingkat pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan SMA dapat dianggap sebagai tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan mampu memberikan landasan pengetahuan yang lebih luas kepada individu.

Namun, perlu diperhatikan bahwa data ini hanya mencerminkan tingkat pendidikan mayoritas penduduk, dan masih ada sebagian penduduk dengan tingkat pendidikan yang beragam, seperti pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah pertama (SMP), atau pendidikan tinggi. Dalam menginterpretasikan data ini, penting untuk mempertimbangkan variasi tingkat pendidikan yang ada di kalurahan dan melihat secara holistik kondisi pendidikan di wilayah tersebut. Peran pemerintah dan masyarakat setempat tetap penting dalam memastikan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan di Kalurahan Guwosari.

e. Jumlah Penduduk Kalurahan Guwosari berdasarkan Angkatan Kerja

Tabel II.7

Kualitas Penduduk Angkatan Kerja

Kualitas Penduduk Angkatan Kerja			
No	Penduduk Angkatan Kerja	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	1.102	1.052
2	Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD	1.251	1.151
3	Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP	1.262	839
4	Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA	1.270	1.017
5	Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	111	127
	Penduduk tingkat ketergantungan	2.322	1.931
	Jumlah Total (Orang)	7.318	6.117
		13.435	

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2023

Dari data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Kalurahan Guwosari memiliki tingkat pendidikan SLTA. Penduduk usia 18-56 tahun dengan tingkat pendidikan SLTA merupakan kelompok yang paling dominan dalam kualitas tenaga kerja di kalurahan tersebut. Kemudian, data juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang tamat perguruan tinggi lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTA, seperti perguruan tinggi, masih menjadi kelompok yang paling sedikit dalam komposisi tenaga kerja di kalurahan tersebut. Namun disisi lain data menunjukkan bahwa masih banyaknya tingkat ketergantungan penduduk yang mendominasi.

f. Cacat Mental dan Fisik Kalurahan Guwosari

Tabel II.8

Data Penduduk Cacat Mental dan Fisik

No	Data Berdasarkan Penduduk Guwosari		
	Jenis Cacat	Laki-Laki	Perempuan
1	Tuna Wicara	1	1
2	Tuna Netra	2	3
3	Sumbing	1	0
4	Cacat Fisik/tuna daksa lainnya	9	5
5	Idiot	5	5
6	Gila	9	6
7	Stres	2	2
	Jumlah Total (Orang)	31	22
		53	

Sumber: Profil Kaurahan Guwosari 2023

Berdasarkan data diatas, dilihat bahwa di Kalurahan Guwosari terdapat sejumlah warga dengan kondisi cacat mental dan fisik. Jumlah warga dengan cacat fisik atau tuna daksa tercatat sebagai yang paling banyak dibandingkan dengan jenis cacat lainnya. Cacat fisik dapat mencakup berbagai kondisi seperti kehilangan anggota tubuh, kelainan bentuk tubuh, atau gangguan mobilitas. Kemudian jumlah cacat sumbing dan tuna wicara tercatat sebagai yang paling sedikit. Cacat sumbing dapat merujuk pada gangguan pendengaran, sedangkan cacat tuna wicara dapat merujuk pada gangguan kemampuan berbicara atau berkomunikasi secara lisan. Oleh karena itu, Adanya warga cacat mental dan fisik di Kalurahan Guwosari menunjukkan untuk menaruh perhatian, khusus pada kelompok masyarakat untuk memberikan dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam

membantu meningkatkan kualitas hidup dan inklusi sosial bagi warga dengan kecacatan

g. Keadaan Ekonomi Kelurahan Guwosari

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kalurahan Guwosari menjadi potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat maupun sosial dan budaya. Sebagai contoh, sektor pertanian di kalurahan ini dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk yang berkecimpung dalam budidaya tanaman pangan, hortikultura, atau perikanan. Potensi perkebunan seperti perkebunan kelapa, kakao, atau kopi juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi kalurahan. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki peran penting dalam perekonomian kalurahan. Potensi wisata alam, wisata budaya, atau wisata sejarah yang ada di Kalurahan Guwosari dapat menarik kunjungan wisatawan, sehingga berdampak positif pada pendapatan masyarakat melalui sektor jasa dan perdagangan.

1. Potensi Strategis

Kalurahan Guwosari merupakan wilayah Kalurahan yang terletak diantara empat Kapanewon yaitu; Kapanewon Pajangan, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pandak dan Kapanewon Bantul. Kalurahan Guwosari memiliki potensi strategis, baik itu di potensi Pertanian, Peternakan, Pariwisata maupun Industri kecil dan juga Kuliner. Demikian juga, Kalurahan Guwosari memiliki sektor pariwisata yang menarik. Obyek wisata seperti cagar budaya, agrowisata, air terjun, dan Goa

Selarong. Cagar budaya dan situs petilasan Pangeran Diponegoro menjadi daya tarik sejarah dan budaya yang dapat menarik wisatawan yang tertarik dengan warisan budaya Indonesia.

Potensi industri kecil dan kuliner juga dapat ditemukan di Kalurahan Guwosari. Industri kecil seperti kerajinan tangan atau industri rumah tangga dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Sementara itu, kuliner khas Kalurahan Guwosari, seperti makanan tradisional atau olahan dari hasil pertanian lokal, dapat menjadi daya tarik kuliner bagi wisatawan yang ingin mencoba keunikan kuliner daerah. Dengan adanya potensi-potensi tersebut, Kalurahan Guwosari memiliki peluang yang baik untuk mengembangkan sektor ekonomi yang beragam. Pengembangan pertanian, peternakan, pariwisata, industri kecil, dan kuliner. Potensi-potensi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kalurahan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan potensi ini, penting bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat untuk membangun kemitraan dalam pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses pasar. Dengan upaya bersama, Kalurahan Guwosari dapat menjadi daerah yang berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya, (*Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2023*)

2. Mata Pencaharian Penduduk Kalurahan Guwosari

Data diatas mengenai mata pencaharian penduduk Kalurahan Guwosari memberikan gambaran penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat. Jenis pekerjaan atau mata pencaharian warga guwosari memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari data terlihat beragamnya jenis pekerjaan penduduk Guwosari, baik yang berprofesi seperti PNS, TNI, POLRI, dokter, karyawan swasta, wiraswasta atau pedagang, petani, buruh, pensiunan, jasa, dan lain-lain. Keanekaragaman mata pencaharian ini menunjukkan adanya berbagai sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan penduduk. Profesi sebagai PNS, TNI, dan POLRI menunjukkan keberadaan sektor pelayanan publik dan keamanan dalam stabilitas dan pemerintahan di Kalurahan Guwosari. Adanya dokter dan tenaga kesehatan menandakan adanya akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi penduduk. Sedangkan wiraswasta atau pedagang menunjukkan adanya kegiatan perdagangan dan usaha mikro di kalurahan tersebut. Petani dan buruh menggambarkan adanya sektor pertanian dan industri yang memberikan lapangan kerja dan kontribusi dalam produksi pangan dan barang. Demikian juga dengan pensiunan yang menunjukkan adanya kebijakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan para pensiunan. Kemudian, adanya profesi jasa menunjukkan adanya sektor layanan yang berkembang di kalurahan tersebut.

Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, perlu diperhatikan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial, seperti pemberdayaan usaha mikro, pengembangan sektor pertanian, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan akses lapangan kerja. Hal ini penting adanya dukungan dan pelatihan ke masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan inovasi dalam menjalankan usaha dan memperhatikan diversitas mata pencaharian penduduk, untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pendapatan Kalurahan Guwosari

Pendapatan kalurahan Guwosari merupakan anggaran setiap tahun dan menjadi hak kalurahan. Anggaran kalurahan ini yang meliputi Pendapatan Asli kalurahan dan dana transfer. Berdasarkan Monografi kalurahan 2023 sumber-sumber pendapatan kalurahan terdiri dari:

- Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 262.415.500.-
- Dana Desa (DD) Rp. 1. 509.579.000.-
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1. 299. 377. 250.-
- Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Bantul Rp. 1. 605. 000.000.-
- Bantuan Keuangan Provinsi DIY Rp. 675. 000.000.-
- Pendapatan lain kaluarahan Rp. 23. 166. 902.-

Sumber: Profil Kaluarahan Guwosari 2023

Dari data diatas, menunjukan pendapatan kalurahan Guwosari yang paling besar merupakan dari pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan diukur dari pendapatan asli kalurahan. Berdasarkan data diatas

terlihat bahwa pendapatan kalurahan termasuk sangat cukup baik untuk mendukung pembangunan kaluarahan guwosari, meskipun beberapa sumber dana ini tidak banyak diakses oleh kalurahan. Tetapi sebagai upaya dalam mendukung program pembangunan kalurahan adalah membangun kemitraan pihak pemodal.

D. Sarana Prasarana Desa dan Budaya Kalurahan Guwosari

1. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan hal penting yang diperhatikan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat kalurahan guwosari. Sarana dan prasarana kesehatan sebagai pemenuhan suatu kebutuhan vital bagi masyarakat, terutama pada saat menghadapi situasi seperti adanya wabah Virus Covid-19. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kalurahan Guwosari adalah sebagai berikut:

Tabel II.9

Tenaga Kesehatan dan Balai Pengobatan

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah Orang
1	Paramedis	1
2	Perawat	15
3	Bidan	4
Jumlah Total		20
No	Balai Pengobatan	Jumlah Unit
1	Puskesmas pembantu	1
2	Poliklinik	3
3	Apotik	6
4	Balai pengobatan masyarakat Yayasan swasta	1
Jumlah Total		11

Sumber: *Profil Kaluarahan Guwosari 2023*

Kehadiran tenaga kesehatan Kalurahan Guwosari membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat. Masyarakat guwosari tidak lagi mengalami kesulitan dalam mencari pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Keberadaan tenaga kesehatan di kalurahan Guwosari memberikan manfaat yang sangat berarti dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat. Mereka tidak hanya menyediakan pelayanan medis, tetapi juga memberikan edukasi tentang kesehatan dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Hal ini berpotensi mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit di kalangan masyarakat desa.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel II.10

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah Unit
1	Gedung TK	10
2	Gedung SD	7
3	Gedung SMA	1
4	Perpustakaan kalurahan	1
5	Sarana dan Prasarana pendidikan lainnya	17
Jumlah Total		36

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2023

Dari tabel yang disajikan, dilihat bahwa Kalurahan Guwosari telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang memadai, masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Guwosari seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium,

dan fasilitas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi para siswa. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga mendorong meningkatnya minat belajar dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Dengan adanya akses yang mudah ke fasilitas pendidikan yang lengkap, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi intelektual mereka. Fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan dapat membantu siswa dan masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada perkembangan pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi di kalangan masyarakat.

3. Sarana Olahraga

Tabel II.11

Sarana Olahraga Kaluarahan Guwosari

No	Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Unit
1	Lapangan bulu tangkis	17
2	Meja pingpong	15
3	Lapangan Voli	15
4	Gelanggang remaja	2
5	Jumlah Total	49

Sumber: Profil Kaluarahan Guwosari 2023

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa Kalurahan Guwosari sudah memiliki sarana olahraga yang cukup memadai. Fasilitas seperti lapangan olahraga, arena bermain, atau pusat kebugaran dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk berolahraga, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kebugaran fisik mereka. Selain membantu meningkatkan kebugaran fisik, olahraga juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan kecerdasan emosional. Dalam konteks pandemi,

melakukan olahraga secara teratur juga dapat membantu dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang sangat penting dalam melawan infeksi.

4. Budaya Kalurahan Guwosari

Tabel II.12

Budaya Kalurahan Guwosari

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
	Masyarakat kalurahan Guwosari melestarikan adat budaya sebagai warisan nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya dalam kebudayaan jawa Kraton Yogyakarta.	Perilaku budaya Jawa Islam dengan tata krama yang sangat dijunjung tinggi, seperti adat bertamu, adat bertutur kata, adat berpakaian, adat bermusyawarah dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelestarian nyadran, tirakatan, kenduri, sholawat barzanji, jathilan, sholawat versi jawa, gejog lesung dan lain-lain ● Pelestarian acara Grebeg Selarong merupakan acara merti desa (bersih desa) yang dimaksudkan untuk perayaan panen sebagai rasa syukur kepada Tuhan. ● Pelestarian bangunan kuno yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat, yaitu rumah joglo.

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2019-2023

5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Guwosari

Tabel II.13

Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Guwosari

No	Lembaga Kemasyarakatan Kaluarahan	Jumlah Unit
1.	LKMD/LPM atau sebutan lain	
	Memiliki kantor sendiri	1
	Peralatan Kantor: Komputer, fax	1
	Mesin Tik	0
	Kardek	0
	Buku Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	0
	Jumlah meja dan kursi	0
	Buku Administrasi	0
	Jumlah Kegiatan	0
2.	PKK	
	Gedung/Kantor	1
	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	1
	Kepengurusan	1
	Buku Administrasi PKK	1
	Kegiatan	1
	Jumlah Kegiatan	3
3.	Karang Taruna	
	Kepengurusan	1
	Buku Administrasi	1
	Jumlah Kegiatan	5
4.	BUMDes	
	Memiliki Kantor/Gedung/Menumpang	1
	Kepengurusan	1
	Buku Administrasi	1
	Jumlah Kegiatan	5

Sumber: Profil Kalurahan Guwosarin 2023

Dari tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan di Kalurahan Guwosari telah mencapai tingkat yang cukup baik. Baik dari segi fasilitas administrasi maupun fasilitas lainnya, infrastruktur yang tersedia mendukung kelancaran berbagai kegiatan di tingkat kalurahan. Fasilitas administrasi seperti kantor desa, ruang rapat, dan tempat penyimpanan arsip. Demikian juga dengan fasilitas lainnya di Kalurahan Guwosari yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat menjalankan berbagai kegiatan, seperti pertemuan masyarakat atau kegiatan sosial lainnya dengan lebih baik dan terorganisir.

Meskipun sudah terdapat fasilitas yang cukup baik, tetap penting untuk terus melakukan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas yang ada, untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan fasilitas agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan kalurahan secara keseluruhan.

E. Profil Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat tiga jenis lembaga desa yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di suatu desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Kemasyarakatan. Menurut undang-undang, penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat desa dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga permusyawaratan desa. Oleh karena itu, pemerintahan Desa bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara.

Pemerintah desa atau sebutan lain menyebut kepala desa/lurah dan pemerintahan kalurahan merupakan bagian dari pemerintahan kalurahan. Lurah bertugas mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah Pembantu Kepala lurah yang meliputi Sekretaris Kalurahan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana kewilayahan. Tugas sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan kalurahan yang dipimpin oleh Carik, terbagi menjadi 3 urusan yaitu; urusan keuangan, urusan perencanaan dan urusan tata usaha dan umum. Badan Pelaksana Teknis terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi Pemerintah, seksi Kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan tanggung jawab pelaksanaan mencakup kewilayahan 15 padukuhan di desa Guwosari.

Tabel II.14

Pemerintah Kalurahan Guwosari

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
1	Masduki Rahmad S.IP	Kepala Desa (Lurah)	S1	Laki-laki
2	Muhammad Faza Muzakki S.E	Sekretaris (Carik)	S1	Laki-laki
3	Yudi Susanto A.Md	Kaur Tata Usaha & Umum (Tatalaksana)	D3	Laki-laki
4	Arif Subawanto A.Md	Kaur Keuangan (Danarta)	D3	Laki-laki
5	Miftakhul Khassanah S.H	Kaur Perencanaan (Pangripta)	S1	Perempuan
6	Muhammad Taufik	Ka. Sie Pemerintahan (Jagabaya)	SMU	Laki-laki

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
7	Umarwanto	Ka. Sie Kesejahteraan (Ulu-Ulu)	SMU	Laki-laki
8	Hm. Nizar, BA	Ka. Sie Pelayanan (Kamituwo)	D3	Laki-lai
9	Anwar Aswandi	Dukuh Kedung	SMU	Laki-laki
10	Ichwan	Dukuh Bungsing	SD	Laki-laki
11	Muhammad Hisyam	Dukuh Iroyudan	SMU	Laki-laki
12	Mangku	Dukuh Pringgading	SMU	Laki-laki
13	Sualip	Dukuh Karangber	SMP	Laki-laki
14	Sareh Supardi	Dukuh Kalakijo	SMP	Laki-laki
15	Muhzin Taukhid	Dukuh Dukuh	SMU	Laki-laki
16	Teguh Triyanto	Dukuh Gandekan	SMU	Laki-laki
17	Muhammad Fatkhurohmi	Dukuh Kentolan Kidul	SMU	Laki-laki
18	Mudakir	Dukuh Santan	SMP	Laki-laki
19	Mistijan	Dukuh Watugede	SMP	Laki-laki
20	Widayanto	Dukuh Kembanggede	SMU	Laki-laki
21	Imam Mutaqin	Dukuh Kadisono	SMU	Laki-laki
22	Sulisman	Dukuh Kembangputih	SMU	Laki-laki
23	Ahmad Khalim	Dukuh Kentolan Lor	SMU	Laki-laki

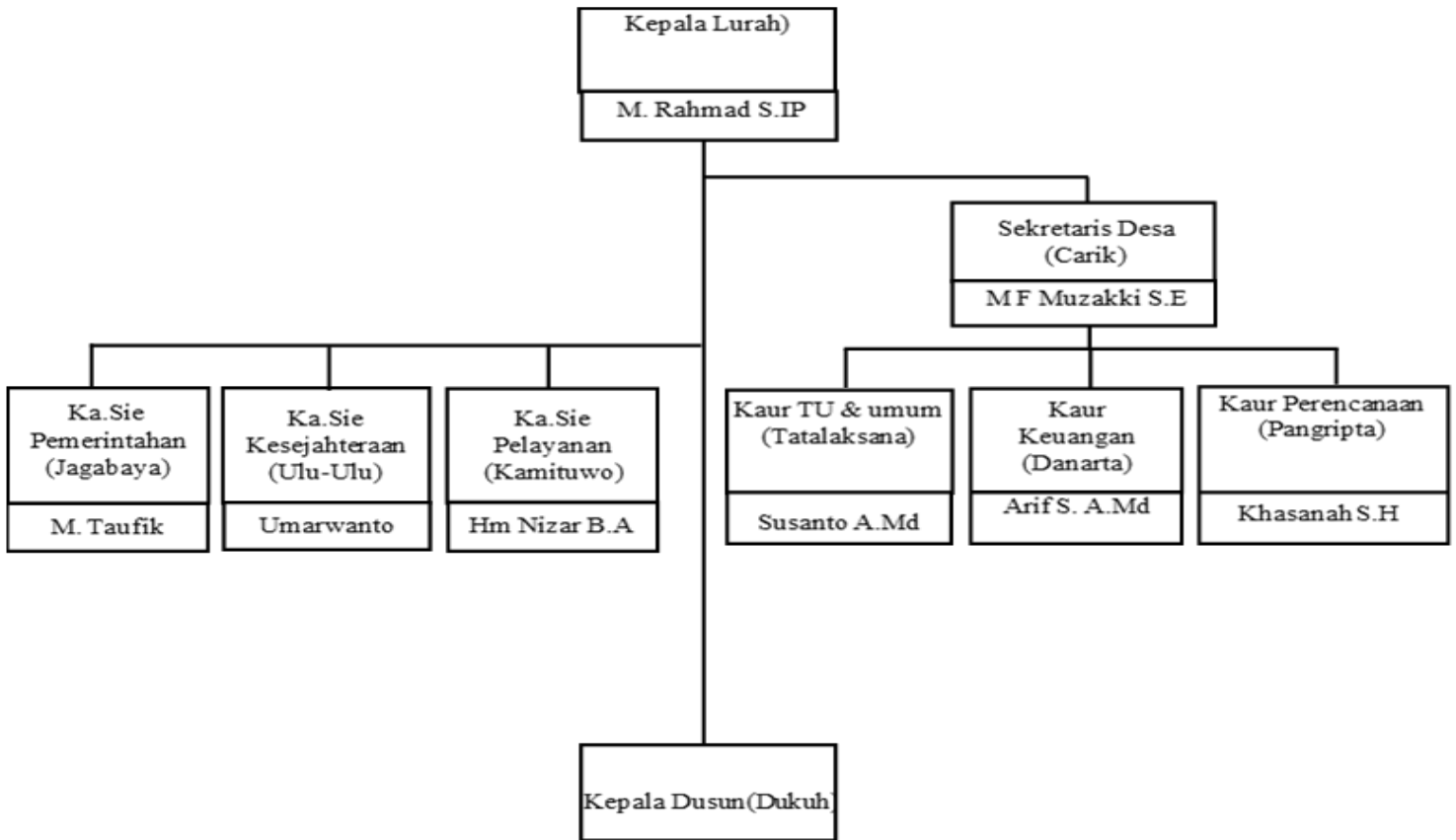
Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2023

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa profil pemerintah Kalurahan Guwosari didominasi oleh laki-laki, sementara hanya ada satu perempuan yang menduduki jabatan dari Kaur Perencanaan. Hal ini mengindikasikan masih terdapat perbedaan gender dalam komposisi kepemimpinan di tingkat kalurahan. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa mayoritas anggota pemerintah Kalurahan Guwosari memiliki pendidikan tingkat SMU. Meskipun tidak ada informasi spesifik mengenai tingkat pendidikan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tingkat SMU lebih dominan dalam kalangan anggota pemerintah desa tersebut. Penting untuk membangun pemerintahan yang

efektif, beragam latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan sangat berharga untuk menghadapi berbagai tantangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

Selain itu, penting juga untuk mendorong pendidikan yang beragam di kalangan anggota pemerintah Kalurahan dengan verifikasi tingkat pendidikan yang memungkinkan membawa perspektif yang berbeda-beda dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan berimbang.

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Guwosari



Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2023.

Gambar Bagan II.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Guwosari

Dari tabel di atas yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi pemerintah desa di Kalurahan Guwosari telah dijelaskan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pergub Nomor 25 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam hal struktur organisasi pemerintah desa. Dalam struktur organisasi tersebut, dijelaskan tugas dan wewenang setiap jabatan atau posisi yang ada dalam

pemerintahan desa. Pergub Nomor 25 Tahun 2019 juga memberikan panduan lebih lanjut terkait struktur pemerintahan desa yang harus disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.

Dengan menyusun struktur penyelesaian yang jelas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah Kalurahan Guwosari menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga pemerintahan desa. Struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan program serta kegiatan pemerintahan desa dengan lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu, untuk memiliki struktur organisasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif diharapkan dengan adanya peraturan dan pedoman yang diikuti, pemerintah Kalurahan Guwosari memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemerintahan desa dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait tugas dan kewenangan yang dijalankan oleh pemerintahan desa.

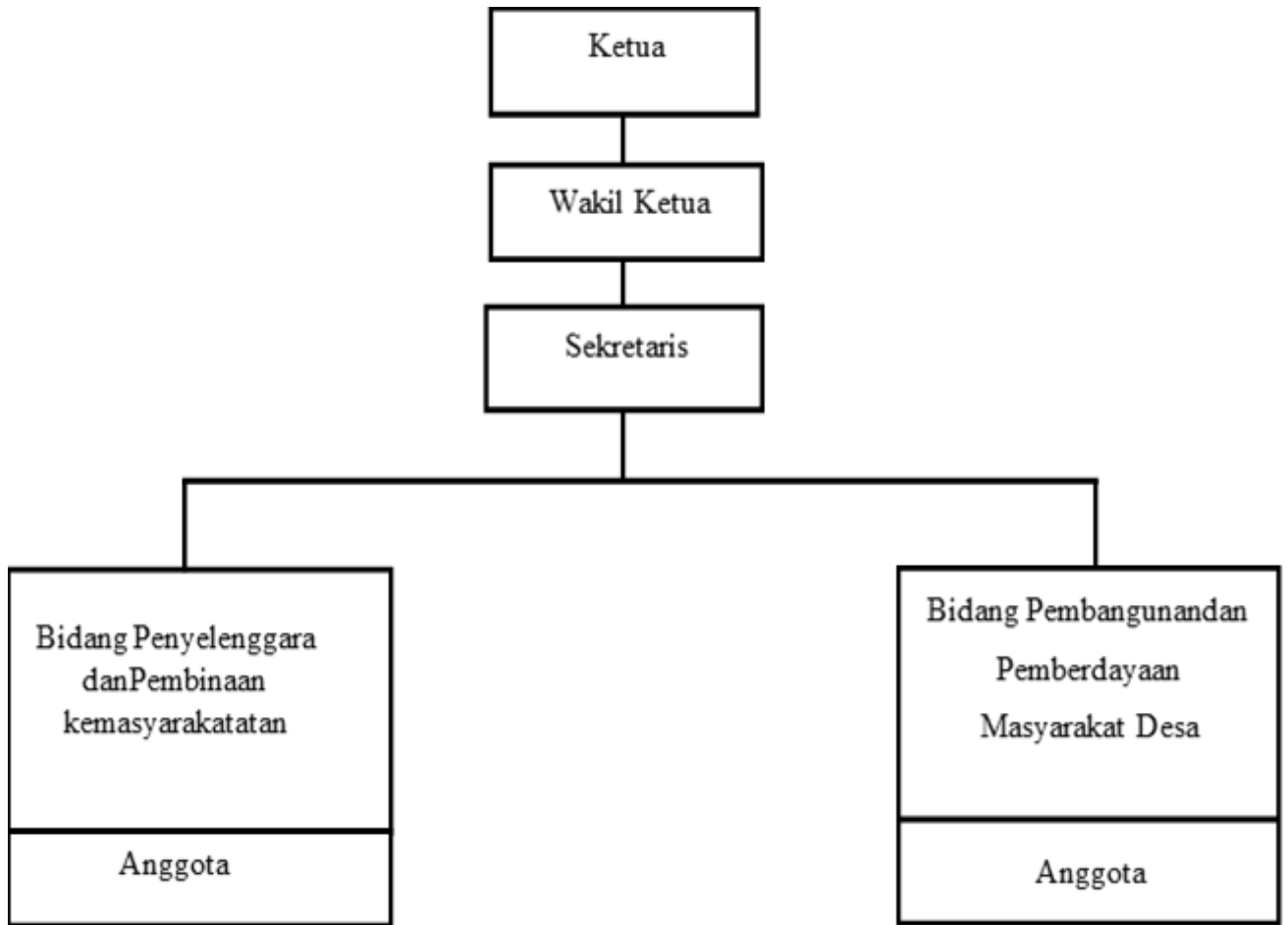
F. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)

Berdasarkan Permendagri Bab 1 Nomor 110 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4, Lembaga Permusyawaratan Desa (Bamuskal) merupakan badan yang berfungsi bekerja sama dengan kepala kalurahan dalam menyusun peraturan kalurahan serta menampung dan mengarahkan keinginan masyarakat. Anggota Bamuskal merupakan perwakilan dari penduduk kalurahan yang dipilih melalui sistem perwakilan

wilayah dalam musyawarah. Bamuskal memiliki kedudukan dalam mengurus kalurahan dan memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama dengan kepala kalurahan, serta menampung dan mengarahkan keinginan masyarakat kalurahan untuk memantau kinerja kepala kalurahan. Lembaga Permusyawaratan Desa (Bamuskal) merupakan suatu sistem yang mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan kalurahan.

Berdasarkan Permendagri Bab 1 Nomor 110 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4. Badan permusyawaratan kalurahan berfungsi untuk bekerja sama dengan kepala kalurahan dalam menyusun peraturan kalurahan untuk menampung dan mengarahkan keinginan masyarakat. Bamuskal memiliki kedudukan dalam hal mengurus kalurahan. sedangkan anggota Bamuskal merupakan perwakilan dari penduduk dari kalurahan yang bersangkutan berdasarkan sistem perwakilan wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah. Fungsi dari Bamuskal adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama dengan kepala kalurahan, serta menampung dan mengarahkan keinginan masyarakat kalurahan untuk dapat memantau kinerja kepala lurah.

Struktur Organisasi BAMUSKAL Kalurahan Guwosari



Sumber: Profil BAMUSKAL Guwosari 2023

Gambar Bagan II.2 Struktur Organisasi BAMUSKAL Kalurahan Guwosari

Tabel II.15

Profil Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Juremi, S.Sos	Ketua
2.	Imam Nawawi	Wakil Ketua
3.	H. Edi Triyanto, S.Ag.S.Pd.,M.Pd	Sekretaris
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat.		
4.	Mohammad Ikhwan Pribadi, S.IP	Ketua Anggota
5.	H. Muhammad Juremi, S.Sos	Anggota
6.	Sumadi	Anggota
7.	Nur Hidayad	Anggota
Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.		
8.	H. Arwan, A.Md	Ketua Anggota
9.	Imam Nawawi	Anggota
10.	H. Edi Triyanto, S.Ag.,S.Pd.,M.Pd	Anggota
11.	Gumiyah	Anggota

Sumber: *Profil Bamuskal Guwosari 2023*

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk desa. Bamuskal menjadi wadah untuk mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Kalurahan Guwosari.

Sebagai badan perwakilan, Bamuskal memiliki peran sentral dalam penyusunan peraturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat di Kalurahan Guwosari yang mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Selain itu, Bamuskal juga memiliki tanggung jawab untuk memantau kinerja kepala lurah dan menampung serta mengarahkan keinginan masyarakat. Sehingga menjaga akuntabilitas dan transparansi

pemerintahan Kalurahan Guwosari, serta memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya Bamuskal yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat, mampu menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kalurahan Guwosari. Melalui partisipasi aktif dan peran Bamuskal dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan serta memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat peran dan fungsi Bamuskal dalam meningkatkan pelayanan publik, menggali potensi masyarakat, serta memastikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan di Kalurahan Guwosari.

G. Profil BUM Desa Guwosari Maju

Sejarah pembentukan BUM Desa tidak lepas dari pemberian otonomi desa melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan otonomi asli yang diberikan, desa dituntut untuk mandiri dalam mengatur, merencanakan, dan memprogram untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Salah satu upaya dalam mencapai otonomi asli desa adalah melalui pendirian BUM Desa.

Diketahui BUMDes Guwosari Maju Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari yang berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2016. BUMDes Guwosari Maju Sejahtera

dibentuk pada tanggal 29 Juli Tahun 2017. Pendirian BUM Desa di Kalurahan Guvosari didasari desakan ataupun dorongan dari pemerintah namun hal ini merupakan kreasi dalam kelembagaan yang lahir dari suatu keinginan dan semangat pemerintah dan masyarakat Kalurahan Guvosari.

BUM Desa merupakan lembaga ekonomi pedesaan yang bertujuan untuk mengelola potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa menjadi penyokong ekonomi bagi masyarakat pedesaan dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta perekonomian masyarakat. Dengan adanya BUM Desa Guvosari Maju Sejahtera, dapat terciptanya pengelolaan sumber daya dan potensi desa yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Kalurahan Guvosari. Melalui penguatan BUM Desa, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi lokal, sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh warga desa.

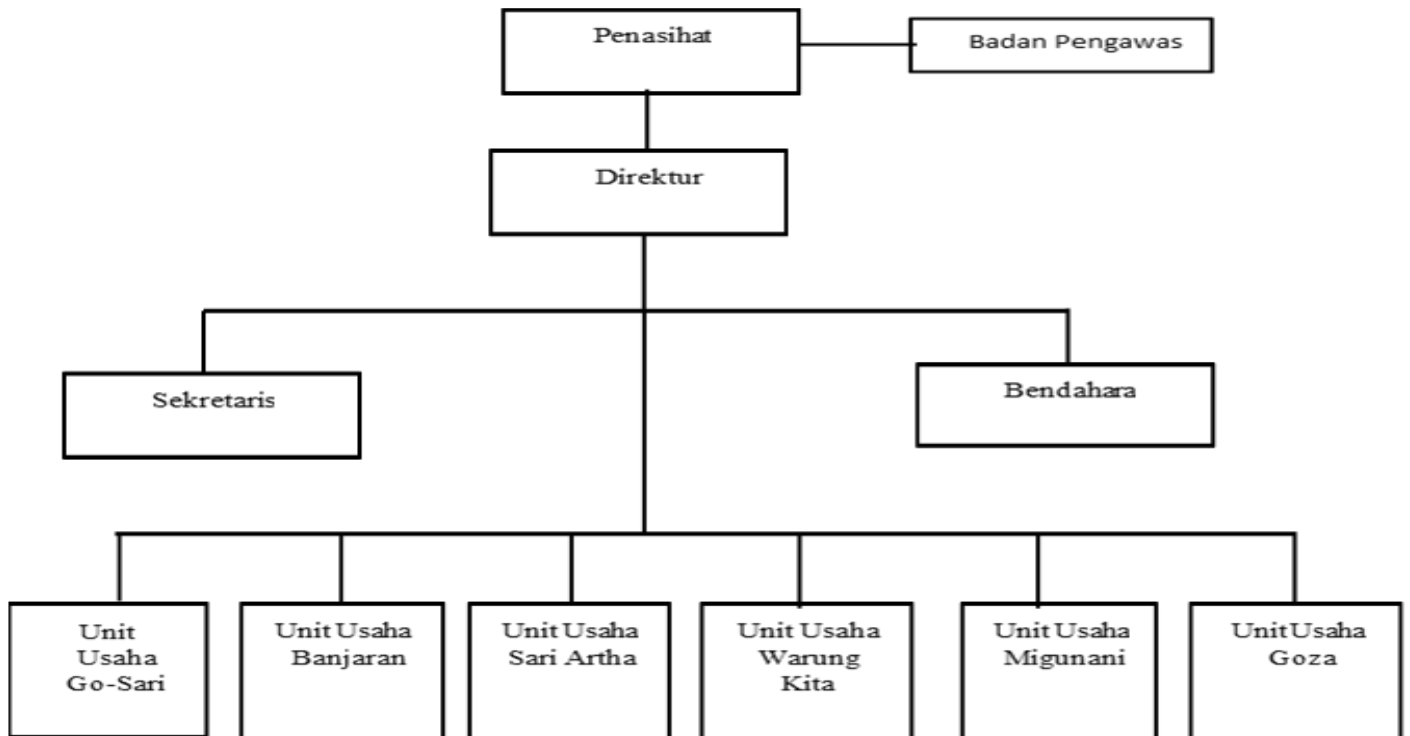
1. Struktur Organisasi BUM Desa Guvosari Maju Sejahtera

Struktur organisasi merupakan susunan dari beberapa komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Pembentukan struktur organisasi lebih mengarahkan pembagian kerja dan mengenai bagaimana fungsi dari berbagai kegiatan berbeda yang telah dikoordinasikan, sekaligus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya serta hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik terdapat penjelasan hubungan

wewenang siapa yang melapor kepada siapa, jadi ada pertanggung jawab atas apa yang akan dikerjakan.

BUM Desa Guwosari Maju mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari: Direktur sebagai ketua BUM Desa Guwosari Maju, BPD sebagai yang melakukan pengawasan. Disusul oleh Sekretaris dan Bendahara. Kemudian bagian akhirnya terdapat unit-unit usaha BUMDes yang terdiri dari unit usaha Banjaran, unit usaha Go-Sari, unit usaha Goza, unit usaha Miguanani, unit usaha Sari Artha dan terakhir unit usaha Warung Kita. Struktur organisasi BUM Desa Guwosari adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi BUM Desa Guwosari Maju 2023



Sumber: Profil BUM Desa Guwosari 2023

Gambar Bagan II.3 Struktur Organisasi BUM Desa Guwosari Maju 2021

Struktur Organisasi BUM Desa Guwosari Maju di atas peneliti peroleh dari profil BUM Desa tahun 2023 yang merupakan dokumen terbaru BUM Desa yang dibuat pada tahun 2022-2023. Sehingga pada dokumen tersebut ada penambahan unit usaha yang baru yaitu Banjaran dan Sari Artha. Kedua unit usaha yang baru tersebut lagi mau berjalan di tahun ini dan juga diharapkan mampu membantu masyarakat di unit-unit usaha yang baru ini yang telah dibuat sebagai mestinya.

2. Unit-Unit Usaha BUMDes

BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dapat menjalankan bisnis sosial secara sederhana

bersama masyarakat guwosari. Mereka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan, berbagi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Unit usaha BUM Desa Guwosari terus berkembang dari tahun ke tahun. Berikut adalah beberapa unit usaha yang dimiliki oleh BUM Desa Guwosari antara lain;

a. Unit Usaha Go-Sari

Ketua BUM Desa, Yuga, menyampaikan harapannya bahwa unit usaha dapat berhasil mengolah sampah rumah tangga dan jenis lainnya sesuai dengan kemampuannya. Hadirnya Go- Sari untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam pengadaan tempat pembuangan akhir (TPA), namun unit usaha ini tidak mendapat banyak kendala disaat masa pandemic Covid-19 yang sedang berlangsung. Unit Go-sari adalah produk/ kegiatan yang dilaksanakan untuk pengambilan sampah, pengelolaan sampah khususnya organik dan residu menjadi produk baru yang bernilai tinggi. Jasa layanan meliputi langganan penjemputan sampah rumah tangga dan sejenis, evakuasi sampah. Dengan demikian, BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera turut berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, sambil memberikan nilai tambah melalui produk-produk baru yang dihasilkan.

Gambar II.4 Unit Usaha Go-Sari



b. Unit Usaha Warung Kita

Unit usaha ini adalah unit yang mengelola Jasa Catering, Kuliner dan produk makanan olahan basah, dengan melibatkan kelompok masyarakat produktif, kelompok wanita tani maupun individu yang berada di bidang garap unit ini, dengan melakukan pendataan, sehingga pelaku UMKM bidang ini dapat terbantu, baik dari sisi jejaring maupun penjualan. Unit Warung Kita merupakan upaya terciptanya iklim usaha dibidang jasa boga di Guwosari, dengan melibatkan warga guwosari dalam Menyediakan kebutuhan jasa boga seperti; snack/makan, aneka kue/jajanan khas dari produk olahan warga guwosari, Menyediakan persewaan peralatan Catering, Menyediakan pengadaan sarana untuk paket acara seperti; (resepsi, ulang tahun, arisan, aqiqah, rapat-rapat, dll), dan Membuka kelas memasak/cooking class untuk dewasa maupun anak- anak.

Namun unit usaha ini memiliki kendala yang signifikan akibat adanya pandemic covid-19 yang melanda dunia dan pemberlakuan pembatasan dan lockdown sehingga aktivitas bisnis mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya. Meskipun demikian, didalam situasi kesulitan yang diakibatkan oleh covid-19, unit usaha ini memilih untuk turut membantu dengan mengalihkan kepada orang-orang yang ditengah krisis.

Gambar II.5 Unit Usaha Warung Kita



c. Unit Usaha Banjaran

Unit usaha Banjaran ini merupakan sebuah unit dalam pengembangan kawasan wisata sejarah Goa Selarong di Yogyakarta. Fokusnya pada wisata edukasi, sejarah, dan budaya, dengan lahan seluas 5,5 Ha dapat menjadi ruang terbuka hijau yang ramah untuk semua kalangan dan menjadi salah satu tujuan wisata utama di Yogyakarta.

1. Unit usaha ini berperan dalam memberdayakan masyarakat setempat secara ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi warga.
2. Melalui kegiatan wisata edukasi, unit usaha ini berkomitmen untuk mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai penting mengenai pendidikan, sejarah, seni, dan budaya lokal.
3. Unit usaha ini menjadi wadah untuk mengumpulkan dan mempromosikan produk-produk unggulan yang berasal dari masyarakat sekitar Goa Selarong, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada mereka.
4. Unit usaha ini menyediakan berbagai jenis kegiatan yang menarik seperti kuliner, kegiatan luar ruangan (outbound), berkemah (camping), dan akomodasi glamor (glamping) untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.
5. Unit usaha ini menjadi tempat pertemuan dan interaksi antara berbagai komunitas, baik lokal maupun dari luar daerah, sehingga

dapat memperkaya pengalaman wisata dan membangun jaringan yang lebih luas.

Meskipun unit usaha Banjaran masih terbilang baru dan akan berjalan pada tahun 2021, namun potensi-potensi yang dimilikinya menjanjikan dalam mendukung pengembangan kawasan wisata Goa Selarong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Gambar II.6 Unit Usaha Banjaran



d. Unit Usaha Sari Artha

Unit usaha ini berperan sebagai pengelola jasa simpanan keuangan perbankan, dengan menyediakan layanan tabungan bagi pelanggan. Upaya ini memberikan manfaat positif ke masyarakat guwosari dengan menerapkan penyertaan modal ataupun partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyertakan modalnya dan akan dipinjamkan kepada masyarakat atau kelompok yang membutuhkan dengan tujuan untuk memberikan jasa keuangan pada mereka yang membutuhkan dengan melayani transaksi keuangan (tabungan, transfer, deposito, simpan uang kelompok, penyaluran KUR, dll) serta pembayaran angsuran/cicilan

Gambar II.7 Unit Usaha Sari Artha



e. Unit Usaha Goza

Diketahui Unit ini berfokus pada jasa persewaan peralatan, kemasan acara dan jasa keagenan. Unit usaha ini memberikan bantuan kepada masyarakat guwosari dalam memenuhi kebutuhan berbagai cara, seperti pemetaan udara dan dokumentasi acara lainnya dengan melibatkan kelompok di setiap unit usaha BUMDes dilakukan oleh Goza, mulai dari kemasan acara, publikasi, pelaksanaan hingga pada pelaporan. Goza sepenuhnya akan bertanggung jawab dalam mengkoordinasi seluruh aspek tersebut;

1. Koordinator pelaksanaan acara/kegiatan unit usaha BUMDes, kegiatan/acara oleh warga/kelompok (kemasan event)
2. Mengkoordinir kunjungan kerja ke kalurahan/BUMDes/paket kunjungan di obyek-obyek wisata di Guwosari
3. Dokumentasi via udara (persewaan drone)

Berdasarkan dengan data diatas menunjukan bahwa unit usaha ini tidak dapat beroperasi dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan dalam pelaksanaan acara dan pertemuan.

Gambar II.8 Unit Usaha Goza



f. Unit Usaha Migunani

Unit Usaha ini adalah unit yang mengelola di bidang Jasa Perdagangan umum Pengadaan Barang dan Jasa. Menggandeng

masyarakat produktif, produk UMKM dan memasarkannya dalam satu wadah dalam berbagai media jejaring dan komunitas digital. Toko online untuk pemasaran hasil-hasil produksi masyarakat, melalui www.pasardesa.id dan www.guwosari.bumdesmart.id. Unit “sapu jagad” melayani kebutuhan warga berupa pemenuhan barang secara individu maupun kelompok kegiatan masyarakat.

1. “Brand Owner” produk-produk UMKM
2. Jasa talangan pengadaan barang
3. Mendorong terciptanya usaha bersama masyarakat
4. Mendorong kerjasama pelaku ekonomi/kelompok masyarakat: Petani/Gapokan, LPMD, PKK, Pemuda.
5. Mempersiapkan diri tergabung dalam BUMDes bersama Indonesia

Berdasarkan data yang saya dapat unit usaha migunani sempat terhenti pada Saat pandemi Covid-19, namun setelah adanya kebijakan-kebijakan dari BUMDes pada saat Covid-19 maka unit usaha inipun dialihkan untuk penyaluran bansos dan juga untuk membantu masyarakat yang berdampak terhadap Covid-19 ini.

Gambar II.9 Unit Usaha Migunani



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan-pemaparan terkait penelitian di atas dan pembahasan terkait Strategi BUMDes Guwosari Maju Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saat ini BUMDes guwosari masih mempunyai beberapa kendala yaitu adanya keterbatasan modal. Sehingga BUMDes saat ini hanya berkonsentrasi pada unit usaha yang sudah berjalan, seperti pengelolaan sampah dan wisata banjaran. Selain itu, BUMDes Guwosari juga telah membantu para pelaku usaha dengan fasilitas yang dimiliki oleh BUMDes, yaitu dengan membantu untuk memasarkan produk masyarakat setempat. Meskipun tidak sepenuhnya menjangkau penjualan produk para pelaku usaha. BUMDes Guwosari berupaya agar langkah kedepannya dapat membuka jasa keuangan untuk menyediakan modal usaha kepada masyarakat kalurahan guwosari yang memiliki potensi bisnis yang menjanjikan.

Selain itu, bantuan sarana prasarana juga menjadi fokus utama yang dibutuhkan oleh usaha masyarakat, seperti pengembangan usaha, pusat produksi, atau fasilitas penjualan. Namun saat ini BUMDes Guwosari belum memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha dan memfasilitasi distribusi produk ke pasar yang lebih luas. Akan tetapi selama proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, BUMDes Guwosari memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada

masyarakat yang meliputi pelatihan, konsultasi, dan monitoring untuk membantu masyarakat dalam mengelola usaha secara optimal.

Demikian juga, BUMDes Guwosari dalam penguatan kelembagaan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan manajemen dan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam mengelola BUMDes. Namun, saat ini kelembagaan yang dibentuk oleh BUMDes Guwosari belum ada sehingga BUMDes yang tidak beroperasi secara efektif dan efisien, serta membuat suatu keputusan yang baik, dan menghadapi tantangan dan peluang dengan lebih baik.

Selanjutnya BUMDes Guwosari saat ini belum membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pelaku bisnis local, untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih luas, seperti pembiayaan tambahan, pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas produk atau layanan.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut;

1. Pengelola BUMDes Guwosari Maju Sejahtera diharapkan untuk membangun kemitraan dengan Lembaga keuangan, perguruan tinggi dan pelaku bisnis lokal yang luas terhadap sumber daya, pembiayaan dan pengetahuan untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat. Kemudian, membangun relasi dengan BUMDes dari kalurahan lain untuk bertukar pengalaman dan pembelajaran.

2. BUMDes Guwosari Maju Sejahtera dapat memperluas akses sarana dan prasarana masyarakat kalurahan guwosari ke pasar yang lebih luas dengan menjalin kemitraan pihak toko dan meningkatkan promosi produk masyarakat melalui media sosial atau website lainnya.
3. BUMDes Guwosari Maju Sejahtera dapat meningkatkan program pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat kalurahan guwosari yang mencakup keterampilan dalam mengembangkan usaha dengan mengoptimalkan potensi usaha masyarakat dengan melibatkan mentor yang memberikan langsung pendampingan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi, (1998) *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan, (2007) *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu sosial lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suharyanto, Rossana Dewi & M. Barori, (2014). *Buku Pintar Pengembangan dan Pengelolaan BUMDesa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Soetomo, (2015) *Pemberdayaan Masyarakat. (mungkinkah muncul antitesisnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi (2014) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (kajian strategis pembangunan kesejahteraan dan pekerja sosial)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharyanto & Hastowiyono. (2014). *Seri Pintar Buku Pelembagaan BUM Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Zubaedi (2007) *Wacana Pembangunan Alternatif, (ragam perspektif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat)*. Yogyakarta: Ar-Russ Media.

JURNAL

- Alfiansyah, (2021) Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5(2).
- Fauziah, N., & Rifa, A. B. (2021). *Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDES Munggaran*. 6(November), 479–498.
- <https://www.pelajaran.co.id/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/>. (n.d.). *Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Faktor, Pendekatan, Strategi dan Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. <https://www.pelajaran.co.id/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/>
- Mulyawan, D. R. (2016). MASYARAKAT, WILAYAH, DAN PEMBANGUNAN. In *UNPAD PRESS*.
- Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (STUDI Bumdes MAWAR DESA KEPEL, KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN NGANJUK). *Publika*, 8(5), 1–12.
- Purnomo, U. (n.d.). *APA ITU BUM Desa? FUNGSI, TUJUAN DAN MANFAATNYA - Website Resmi Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen*. <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>
- Ristiana, R., & Amin, Y. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal of Nonformal Education and*

Community Empowerment, 4, 88–101.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.31319>

Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal*, 2(1), 1–19.
<https://media.neliti.com/media/publications/110259-ID-peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-da.pdf>

Suharyanto & Hastowiyono. (2014). *Seri Pintar Buku Pelembagaan BUM Desa*.

Suhud, D. (2020). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (bumdes) di kalurahan bleberan kapanewon playen kabupaten gunungkidul provinsi daerah istimewa yogyakarta* (Vol. 23).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Usaha Milik Desa.

INTERNET

<https://www.pelajaran.co.id/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/>. “Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Faktor, Pendekatan, Strategi dan Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”

Lampiran
Dokumentasi Wawancara



Wawancara:

Nama : Yuga
Jabatan : Direktur BUMDes Guvosari
Hari/Tgl : Sabtu 21 Januari 2023
Waktu : 14:11
Tempat : Balai BUMDes Guvosari



Wawancara:

Nama : Muhammad Ibdal
Jabatan : Sekjen BUMDes Guvosari
Hari/Tgl : Rabu, 22 Maret 2023
Waktu : 14:33
Tempat : Balai Pengelolaan sampah



Wawancara:

Nama : Usmarwanto
Jabatan : Ulu-Ulu Pemerintah Kalurahan Guvosari
Hari/Tgl : Selasa, 28 Maret 2023
Waktu : 10:00
Tempat : Ruangan Ulu-ulu Pemerintah Guvosari



Wawancara:

Nama : Muhaimin
Jabatan : BAMUSKAL Guvosari
Hari/Tgl : Kamis, 30 Maret 2023
Waktu : 15:00
Tempat : Balai KUA Bantul



Wawancara:

Nama : Anna
Jabatan : Pelaku Usaha Tempe
Hari/Tgl : Selasa, 18 April 2023
Waktu : 11:25
Tempat : Rumah Kediannya



Wawancara:

Nama : Anwar
Jabatan : Usaha Warung Makan
Hari/Tgl : Selasa, 18 April 2023
Waktu : 12:25
Tempat : Rumah Kediannya



Wawancara:

Nama : Imam Nawawi
Jabatan : Pengurus Gapoktan dan Penasehat Kawete
Hari/Tgl : Selasa, 18 April 2023
Waktu : 13:59
Tempat : Rumah Kediannya

Panduan Wawancara
Pengurus BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera
Informen: Pengurus BUMDes

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Tempat Tinggal :
Pendidikan :
Hari Tanggal :
Jam :

B. Pertanyaan

BUMDes Mendukung pelaku usaha

a. Pemberian Modal

1. Apakah BUMDes pernah memberikan modal pada pelaku usaha?
2. Apakah masyarakat atau pelaku usaha pernah mendapatkan modal dari lembaga keuangan?
3. Siapakah yang memfasilitasi masyarakat/pelaku usaha sehingga bisa mengakses modal pada lembaga keuangan atau perbankan?

b. Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana

1. Apakah BUMDes pernah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat/pelaku usaha?
2. Jenis sarana dan prasarana yang diberikan itu apa saja?
3. Siapa saja yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari BUMDES itu?

c. Bantuan Pedampingan

1. Apakah BUMDes pernah memberikan pendampingan ke masyarakat/pelaku usaha?
2. Bentuk pendampingan apa saja yang diberikan kepada masyarakat/pelaku usaha?
3. Dari pihak mana saja yang melakukan pendampingan ke masyarakat/pelaku usaha?

d. Penguatan Kelembagaan

1. Apakah BUMDes pernah menghimpun pelaku usaha/masyarakat yang memiliki usaha secara perorangan dalam satu wadah?
2. Legalitas lembaga usaha?
3. Apakah wadah yang telah terbentuk sudah berbadan hukum atau belum?

e. Penguatan Kemitraan Usaha (Kepastian Pasar)

1. Pihak mana saja yang bermitra dengan masyarakat/pelaku usaha dalam proses produksi?
2. Siapakah yang memfasilitasi sehingga masyarakat/pelaku usaha bisa bermitra dengan pihak-pihak tersebut dalam proses produksi?
3. Dalam mendapatkan modal, masyarakat/pelaku usaha bermitra dengan siapa saja?
4. Siapakah yang memfasilitasi sehingga masyarakat/pelaku usaha bisa bermitra dengan pihak-pihak tersebut?
5. Pihak mana saja yang bermitra dengan masyarakat/pelaku usaha dalam mendistribusikan produksi?
6. Siapakah yang memfasilitasi sehingga masyarakat/pelaku usaha bisa bermitra dengan pihak-pihak tersebut dalam mendistribusikan produk?

Panduan Wawancara
Masyarakat Desa Guwosari
Informen: Masyarakat Pelaku Usaha

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Tempat Tinggal :
Pendidikan :
Hari Tanggal :
Jam :

B. Pertanyaan

Dukungan dari BUMDes terhadap Pelaku Usaha

a. Pemberian Modal

1. Apakah BUMDes pernah memberikan modal para pelaku usaha?
2. Apakah pelaku usaha pernah mendapatkan modal dari lembaga keuangan?
3. Siapakah yang memfasilitasi pelaku usaha sehingga bisa mengakses modal pada lembaga keuangan atau perbankan?

b. Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana

1. Apakah BUMDes pernah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat/pelaku usaha?
2. Jenis sarana dan prasarana yang diberikan itu apa saja?
3. Siapa saja yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari BUMDES itu?

c. Bantuan Pendampingan

1. Apakah BUMDes pernah memberikan pendampingan ke masyarakat/pelaku usaha?
2. Bentuk pendampingan apa saja yang diberikan kepada masyarakat/pelaku usaha?
3. Dari pihak mana saja yang melakukan pendampingan ke masyarakat/pelaku usaha?

d. Penguatan Kelembagaan

1. Apakah BUMDes pernah menghimpun pelaku usaha/masyarakat yang memiliki usaha secara perorangan dalam satu wadah?

e. Penguatan Kemitraan Usaha (Kepastian Pasar)

1. Pihak mana saja yang bermitra dengan masyarakat/pelaku usaha dalam proses produksi?

2. Siapakah yang memfasilitasi sehingga masyarakat/pelaku usaha bisa bermitra dengan pihak-pihak tersebut dalam proses produksi?
3. Dalam mendapatkan modal, masyarakat/pelaku usaha bermitra dengan siapa saja?
4. Siapakah yang memfasilitasi sehingga masyarakat/pelaku usaha bisa bermitra dengan pihak-pihak tersebut?
5. Pihak mana saja yang bermitra dengan masyarakat/pelaku usaha dalam mendistribusikan produksi?
6. Siapakah yang memfasilitasi sehingga masyarakat/pelaku usaha bisa bermitra dengan pihak-pihak tersebut dalam mendistribusikan produk?

Panduan Wawancara
Pengawas BUM Desa

Informen: Badan Pengawas BUM Desa

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Tempat Tinggal :
Pendidikan :
Hari Tanggal :
Jam :

B. Pertanyaan:

1. Bagaimana awal mulanya pemerintah kalurahan mendirikan BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera?
2. Apa alasan pemerintah kalurahan Guwosari dalam mendirikan BUMDes?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendirikan BUM Desa?
4. Bagaimana peran pemerintah kalurahan dalam pengelolaan BUMDes?
5. Apakah BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat?
6. Bagaimana proses atau tahapan pengawasan BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera?
7. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah desa dalam pengembangan BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera?
8. Apakah dengan keberadaan BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera membantu pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat?